

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
TAHUN 2015



## BAB I PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM



*Pendahuluan berisi :*

- A. Gambaran Umum**
- B. Struktur Organisasi dan Aparatur Daerah**
- C. Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan**
- D. Sistematis Pelaporan**

**L**aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Padang Pariaman merupakan sebuah bentuk laporan yang dibuat setiap akhir periode pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus menjadi media yang berisi informasi dan data serta gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan seluruh perencanaan program/kegiatan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten.

Sebagai media komunikasi atas kinerja yang telah dilaksanakan kepada para *stakeholder* (Presiden, DPRD dan Masyarakat Umum), maka penyusunan LAKIP Kabupaten Padang Pariaman ini memiliki 2 (dua) dimensi fungsi, yaitu: 1) Aspek Akuntabilitas Kinerja (Dimensi eksternal) hal ini bermakna bahwa LAKIP merupakan sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kepada seluruh pihak eksternal (*stakeholder*) atas capaian kinerja selama periode tahun 2015. Esensi laporan capaian kinerja merujuk sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan telah dicapai dalam rangka pemenuhan visi, misi, tujuan dan sasaran selama periode pelaporan. 2) Aspek Manajemen Kinerja (Dimensi Internal) hal ini



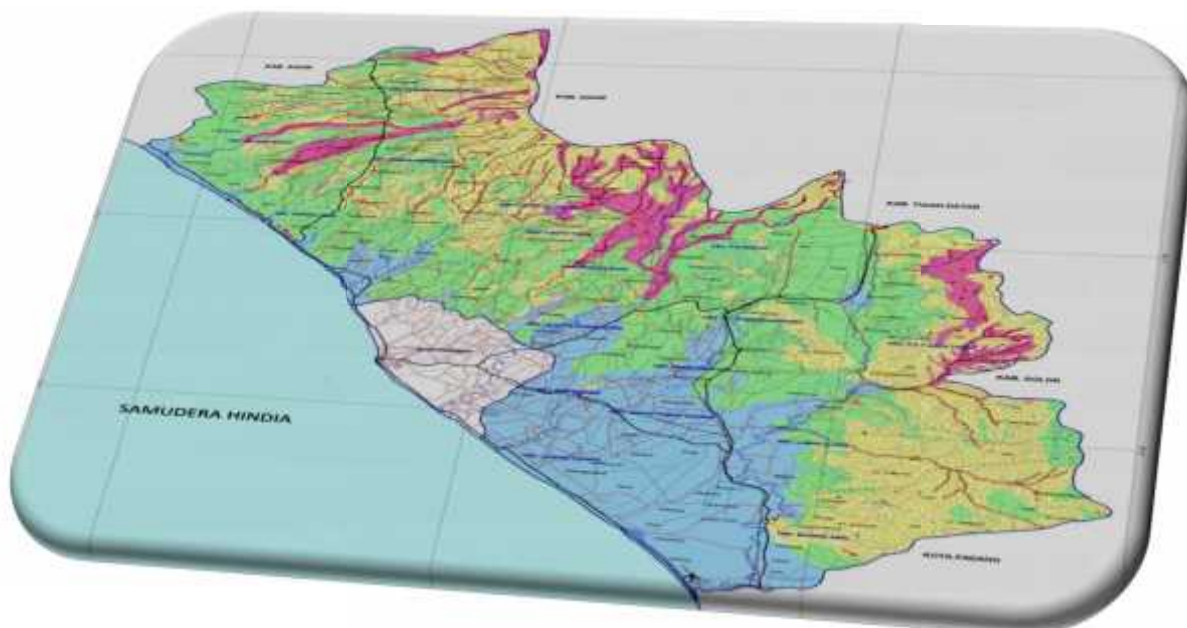
bermakna bahwa LAKIP Kabupaten Padang Pariaman merupakan sarana evaluasi pencapaian kinerja bagi segenap aparatur Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagai landasan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Esensi yang termaktub dalam hal ini adalah untuk setiap kekurangan atau celah dalam pelaksanaan kinerja akan ditemukan strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan patokan pembelajaran saat pelaksanaan program dan kegiatan pada periode anggaran berikutnya.

## 1. Kondisi Geografi

Secara geografis, Kabupaten Padang Pariaman memiliki luas wilayah 1.328,79 Km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai 60,5 Km yang membentang hingga wilayah gugusan Bukit Barisan. Luas daratan daerah ini setara dengan 3,15 persen luas daratan wilayah Propinsi Sumatera Barat. Posisi astronomis Kabupaten Padang Pariaman terletak antara 0°11'-0°49' Lintang Selatan dan 98°36' - 100°28' Bujur Timur. Secara administrasi Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 kecamatan dan 45 Nagari. Batas wilayah administratif Kabupaten Padang Pariaman adalah sebelah Utara dengan Kabupaten Agam, sebelah Selatan dengan Kota Padang, sebelah Timur dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, dan sebelah Barat dengan Kota Pariaman dan Samudera Indonesia.

Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam tercatat memiliki wilayah paling luas, yakni 228,70 km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang memiliki luas wilayah terkecil, yakni 25,56 km<sup>2</sup>. Kecamatan Sungai Geringging dan Kecamatan dari IV Koto Aur Malintang tercatat berada di wilayah yang paling tinggi yaitu 251 meter dari permukaan laut sedangkan yang paling rendah adalah Ulakan Tapakis, Sungai Limau, Gasan Gadang dengan ketinggian 2 meter dari permukaan laut.

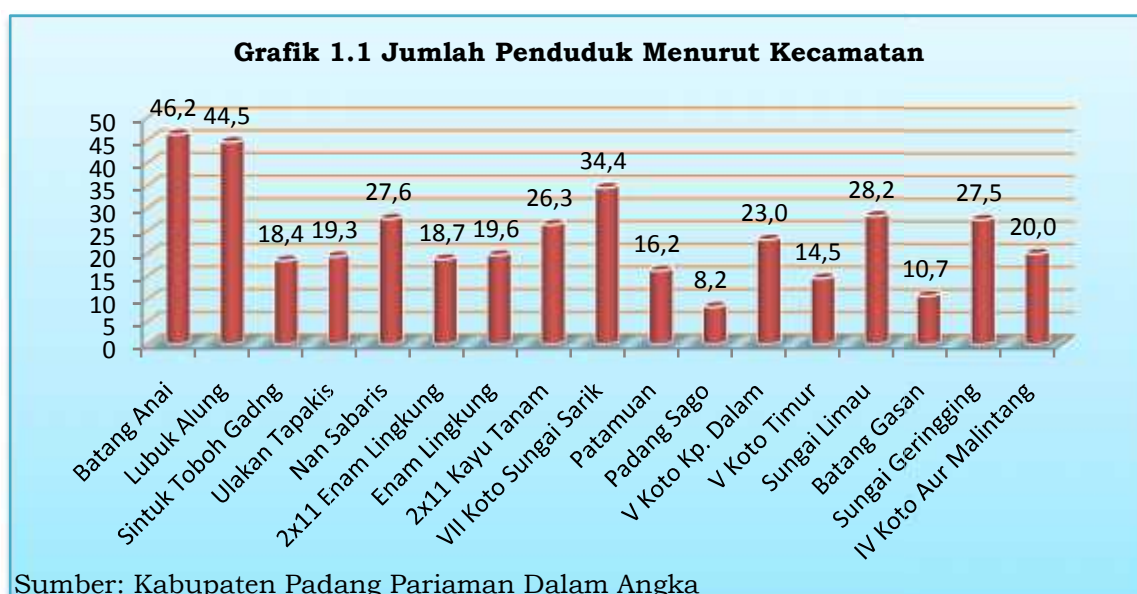




Gambar 1.1 Peta Kabupaten Padang Pariaman

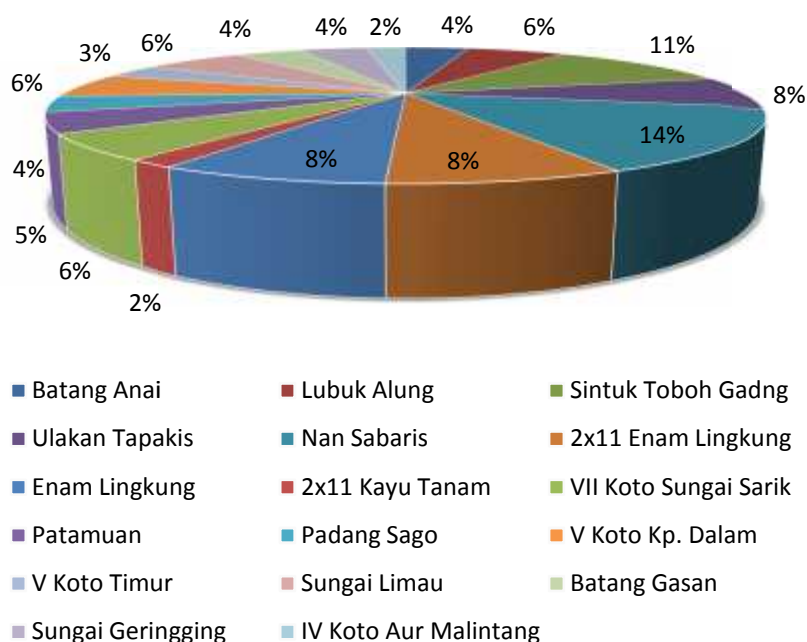
## 2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman hingga tahun 2014 terdapat sebanyak 403.530 jiwa, yang terdiri dari 198.315 laki – laki dan 205.215 perempuan, sedangkan tahun sebelumnya tercatat sebanyak 400.890 jiwa (196.873 laki-laki dan 204.017 perempuan ). Tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2014 terhitung sebanyak 304 jiwa/Km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Batang Anai, yakni 46.192 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Padang Sago yakni 8.176 jiwa.





**Grafik 1.2 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan**



## B. STRUKTUR ORGANISASI DAN APARATUR DAERAH

### 1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 9, Nomor 10, Nomor 11, Nomor 12, Nomor 13, Nomor 14, dan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 5 Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah dipimpin Oleh Sekretaris Daerah yang membawahi 3 (tiga) Asisten dan 11 Bagian, 11 Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah terdiri dari 5 Badan dan 3 Kantor, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat, 1 Satuan Pol-PP, 1 BPBD, 1 Rumah Sakit Type C serta 17 Kecamatan.

Selanjutnya untuk melaksanakan urusan daerah dimaksud telah dijabarkan menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Padang Pariaman yang bertujuan mewujudkan aspirasi masyarakat secara profesional, transparansi, partisipatif dan akuntabel.



Adapun tugas pokok dan fungsi SKPD Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

#### **a. Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah, dengan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah.
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah.
4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.
5. Pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **a. Sekretariat DPRD**

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan daerah.

#### **c. Dinas Daerah**

Sebagai unsur pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dengan fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.



2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **d. Lembaga Teknis Daerah**

Lembaga teknis sebagai unsur penunjang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dibidangnya, dengan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyediaan pelayanan penunjang;
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

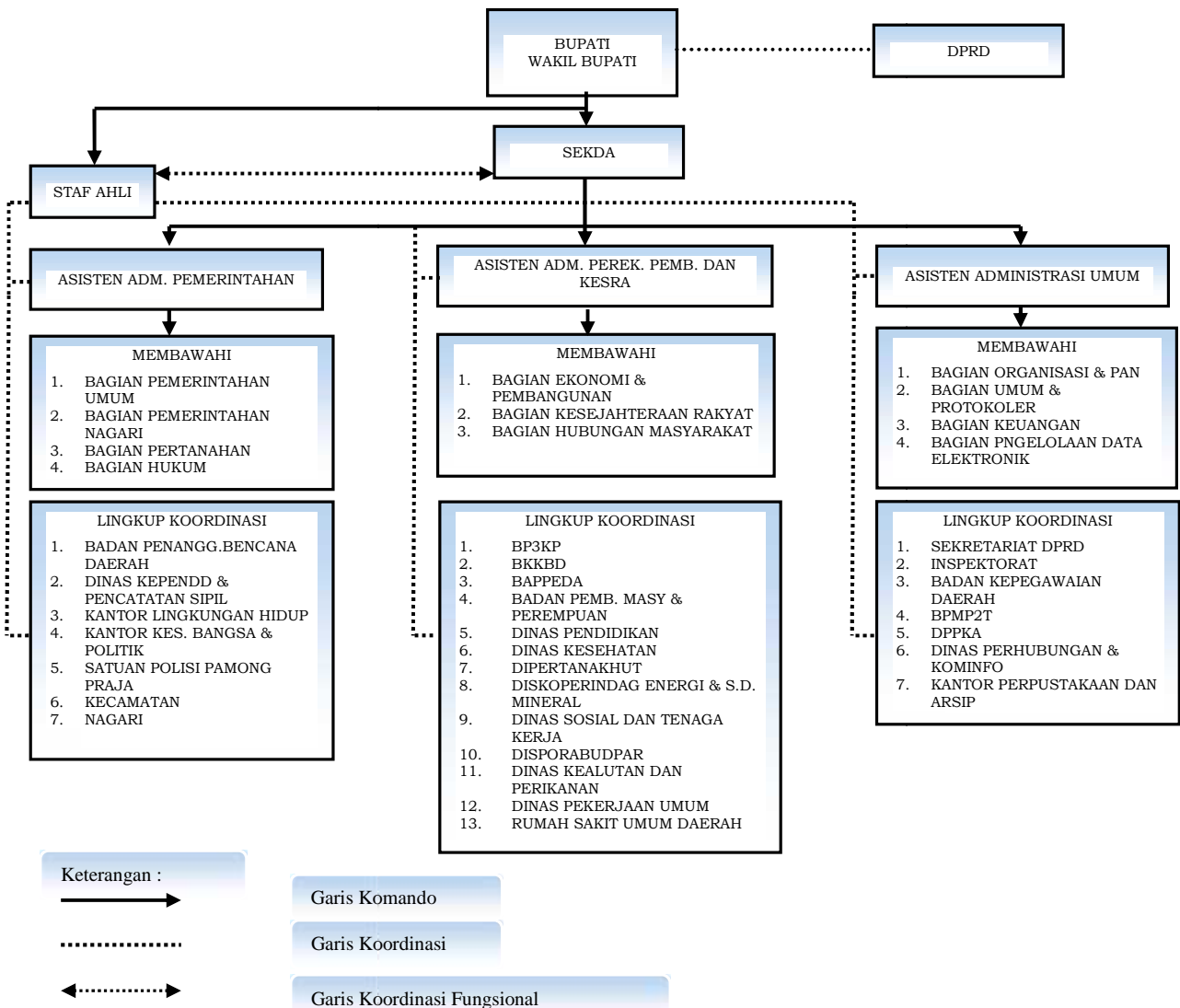
#### **e. Kecamatan**

Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, dengan fungsi sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;



Bagan 1.1 Struktur Organisasi

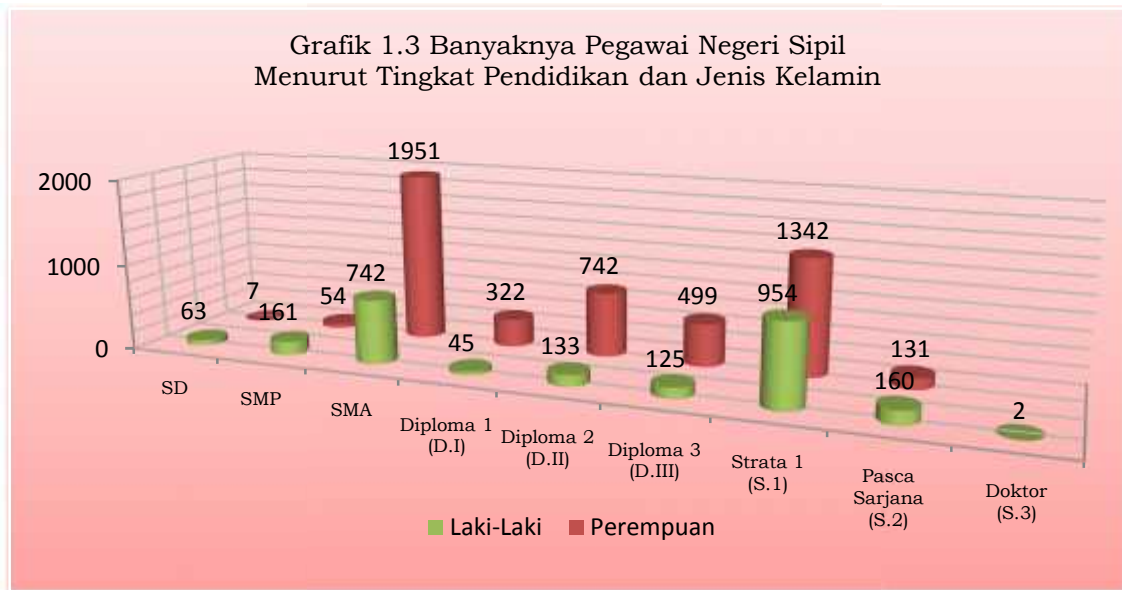


Sumber: Bagian Organisasi dan PAN

## 2. Sumber Daya Aparatur

Hingga akhir tahun 2014 Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman memiliki 7.433 orang pegawai dengan rincian 2.916 orang pegawai Golongan IV, 3.132 orang pegawai golongan III, sebanyak 1.330 orang pegawai golongan II, dan 55 orang pegawai golongan I. Sedangkan jumlah pegawai seluruhnya yang berdinasi di Kabupaten Padang Pariaman baik Instansi Otonom maupun Instansi Vertikal serta BUMN/BUMD tercatat sebanyak 8.614 orang dengan rincian 245 orang golongan I, 1.602 orang golongan II, 3.740 orang golongan III dan 3.027 orang golongan IV.





Sumber: Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka

Berdasarkan penataan dan evaluasi organisasi perangkat daerah perangkat daerah pada tahun 2011 jumlah jabatan struktural dan eselonering di Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut:

**Grafik 1.4 Jumlah Jabatan Struktural Dan Eselonering di Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman**

No	Unit Kerja	Eselonering						Jml
		II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	
1.	Setda	1	3	11	-	27	-	42
	Staf Ahli	-	5	-	-	-	-	5
2.	Sekwan	-	1	4	-	8	-	13
3.	Dinas	-	11	11	43	151	-	216
4.	Badan	-	7	6	25	63	-	101
5.	Inspektorat	-	1	5	-	15	-	21
6.	Kantor	-	-	3	-	12	-	15
7.	Satpol - PP	-	-	1	-	4	-	5
8.	RSUD	-	-	1	4	8	-	13
9.	Kecamatan	-	-	17	17	85	51	170
<b>JUMLAH</b>		1	28	59	89	373	51	601

Sumber: Bagian Organisasi dan PAN Setdakab. Padang Pariaman



## C. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAH PEMBANGUNAN

### 1. Isu Strategis



Isu strategis pembangunan 5 (lima) tahun Kabupaten Padang Pariaman pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2010-2015 adalah:

1. Pemahaman dan pengamalan falsafah “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato, Adat Mamakai*’ dalam kehidupan sehari-hari.

Aspek ini perlu diberi tekanan dan perhatian utama guna dijadikan dasar untuk menyusun strategi dan kebijakan pembangunan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang unggul, religius, cerdas dan sejahtera.

2. Peningkatan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Aspek ini mampu mendorong peningkatan profesionalitas dan kompetensi yang sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja, sehingga mampu mewujudkan tujuan utama yaitu : Intensifikasi pencegahan korupsi; Peningkatan kualitas pelayanan publik; Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Kualitas sumber daya yang baik dapat dijadikan sebagai modal dasar



- pembangunan daerah berbasis sumber daya manusia dalam rangka proses pembangunan daerah yang berdasar pada ilmu dan teknologi. Untuk itu unsur kualitas sumber daya manusia perlu diberikan perhatian yang cukup tinggi.
4. Pembangunan ekonomi yang tangguh dan berdaya saing berbasis sistem agribisnis dan agroindustri  
Peningkatan nilai tambah produk sektor pertanian menjadi modal untuk pengembangan ekonomi masyarakat sehingga mampu menciptakan perekonomian yang tangguh dan mampu bersaing di pasar lokal maupun regional.
  5. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dan pengelolaan sumber daya alam.  
Untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan Keuangan Pemerintah Pusat perlu adanya optimalisasi sektor-sektor yang potensial dan pengelolaan sumber daya alam dengan mempertimbangkan aspek dampak lingkungan sehingga kemampuan keuangan daerah meningkat.
  6. Pemindahan Pusat Pemerintahan.  
Setelah pemekaran Kabupaten Padang Pariaman menjadi Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman maka pusat Ibukota Kabupaten dipindahkan ke Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung (PP No. 79 Tahun 2008).
  7. Kawasan Rawan Bencana.  
Kabupaten Padang Pariaman merupakan daerah yang berada pada zona rawan bencana, seperti gempa, banjir, longsor serta terletak pada sepanjang jalur sesar aktif atau patahan semangka. Untuk itu perlu menyediakan informasi, sarana dan prasarana serta kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi dan menanggulangi bencana.
  8. Pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.  
Pembangunan sarana dan prasarana dapat mendorong peningkatan



ekonomi dan kesejahteraan masyarakat namun dalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan daya dukung kawasan dan lingkungannya sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan.

## 2. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pokok pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

- 1) Permasalahan utama yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat Padang Paraman adalah belum sesuai dengan kultur yang berfalsafah “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato, Adat Mamakai*’ Artinya konteks khazanah budaya Minangkabau, agama dan budaya merupakan dua dimensi nilai inti yang saling bertautan satu sama lain. Kedua dimensi nilai inilah yang membentuk karakteristik personalitas utama masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan nilai utama yang diharapkan mampu melahirkan harmonisasi antara kehidupan yang agamis (Islam) dan kehidupan yang berbadab dan berbudaya. Dalam konteks dan dimensi budaya, keterbukaan wilayah.
- 2) Eksistensi kelembagaan adat pada tingkat nagari semakin lemah dan bahkan semakin memudar, hal ini dapat kita lihat kurangnya peran mamak terhadap kemenakan, berkurangnya musyawarah dan mufakat adat dan kaum dalam pengambilan kebijakan.
- 3) Rendahnya pengamalan dan aplikasi nilai-nilai ajaran agama dan akhlaq masyarakat, apalagi dengan era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, mengakibatkan perubahan pola dan tingkah laku masyarakat sehingga tidak sejalan lagi dengan ajaran dan kaedah agama serta norma-norma adat istiadat Minangkabau.
- 4) Belum maksimalnya peran surau dan mesjid sebagai institusi pembinaan aqidah dan ekonomi umat, hal ini dapat terlihat bahwa banyak mesjid dan surau dibiarkan tinggal atau dipakai hanya untuk sholat jumat saja, tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya seperti untuk sholat lima waktu, pendidikan baca alquran bagi anak-anak dan generasi muda, berkurangnya peran remaja mesjid.



- 5) Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; Sistem dan prosedur kerja di lingkungan aparatur negara belum efisien, efektif, dan berperilaku hemat.
- 6) Pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.
- 7) Terbaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi sehingga melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan produktivitas kerja.
- 8) Belum terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkeperibadian wirausaha.
- 9) Kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik, kurangnya pemerataan guru, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan.
- 10) Kualifikasi tenaga paramedis yang masih jauh dari standar mutu dimana sebanyak 85% tenaga paramedis hanya dengan kualifikasi pendidikan D3 kebawah, Rasio jumlah dokter dengan jumlah penduduk yang masih jauh dari standar mutu yang telah ditetapkan dan terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta belum tuntasnya pembangunan dan pengembangan RSUD kabupaten Padang Pariaman.
- 11) Belum terwujudnya pembangunan ekonomi yang tangguh dan berdaya saing berdasarkan sistem agribisnis dan agroindustri.
- 12) Ketimpangan produktifitas ekonomi sektoral di Kabupaten Padang Pariaman. Sektor pertanian yang mampu menyerap angkatan yang relatif besar (75%), ternyata hanya memberikan sumbangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 24,29 %. Sedangkan sektor industri dengan jumlah angkatan kerja yang diserap hanya 6,13% tapi mampu memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 11,21% dan sektor jasa dengan jumlah angkatan kerja yang diserap hanya 4,25% tapi mampu memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 17 %.
- 13) Kabupaten Padang Pariaman termasuk wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi tapi jumlah penduduk miskinnya juga tinggi.





- 14) Aktivitas usaha pertanian yang belum berorientasi pasar. Pada sisi lain kinerja sektor industri juga belum memperlihatkan kinerja maksimal yang sesuai dengan potensi yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.
- 15) Padang Pariaman memiliki Kemampuan keuangan daerah yang terbatas dengan Sumber Daya Alam terbatas sehingga Pendapatan asli Daerah masih relatif rendah.
- 16) Pemindahan pusat pemerintahan, setelah kota Pariaman menjadi otonom maka pusat Ibukota Kabupaten Padang Pariaman dipindahkan ke Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingsung (PP No. 79 Tahun 2008), untuk itu perlu dilakukan percepatan pembangunan.
- 17) Ketimpangan pertumbuhan wilayah Utara-Selatan, dimana wilayah bagian selatan dilalui oleh koridor jalan nasional yang tumbuh lebih pesat dan bersifat urban sedangkan kawasan utara pertumbuhan cenderung lebih lambat karena masih bersifat pedesaan dan hanya dilalui oleh jalan propinsi.
- 18) Padang Pariaman merupakan daerah yang terparah akibat gempa besar 7,9 skala Richter yang terjadi di daerah Padang Pariaman pada tanggal 30 September 2009 yang lalu yang menelan korban sebanyak 1,200 orang dan ratusan bangunan runtuh dan rusak berat. Hal ini mengakibatkan penurunan derajat ekonomi masyarakat serta rusaknya infrastruktur daerah sehingga menurunkan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
- 19) Perencanaan pengembangan wilayah yang belum sepenuhnya mengadopsi zonasi 'ramah lingkungan' dan 'ramah bencana', baik dari kerawanan gerakan tanah maupun konservasi untukantisipasi tsunami. Hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman merupakan daerah rawan bencana namun isu-isu zonasi ramah bencana belumlah menjadi arus utama (mainstream) dalam perencanaan pembangunan wilayah. Pembangunan pemukiman dan fasilitas umum maupun sosial di sekitar daerah-daerah rawan bencana merupakan bukti nyata yang memperlihatkan eksisnya permasalahan tersebut.
- 20) Meningkatnya ancaman bagi kelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS) karena masih banyaknya sungai yang dimanfaatkan sebagai daerah pertambangan bahan galian golongan C maupun tempat pembuangan



limbah industri dan rumah tangga. Kelestarian sungai berdampak negatif terhadap pasokan air untuk irigasi dan perikanan darat dan sungai, ancaman erosi, ketahanan infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan.

- 21) Prasarana merupakan faktor penunjang dalam pembangunan daerah. Keterbatasan prasarana menyebabkan terbatasnya akses terhadap suatu wilayah. Keterbatasan fasilitas ini akan berakibat menghambat percepatan pembangunan daerah. Di samping itu tata ruang merupakan hasil dari perencanaan tata ruang yang berguna sebagai panduan dalam penataan ruang wilayah. Perspektif tata ruang dalam pembangunan adalah mewujudkan transformasi ekonomi, sosial, dan lingkungan ke dalam tata ruang.



## **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan LAKIP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

### **BAB II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III Akuntabilitas Kinerja.**

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
2. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
6. Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah



digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

#### **BAB IV Penutup.**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA



### Perencanaan Kinerja berisi :

#### A. Visi dan Misi

1. Visi
2. Misi

#### B. Tujuan dan Sasaran Tahun 2015

1. Tujuan
2. Sasaran

#### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

**P**erencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kabupaten Padang Pariaman. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Bupati Padang Pariaman dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi; Peningkatan kualitas pelayanan publik; Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama Kabupaten Padang Pariaman, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi oleh Kabupaten Padang Pariaman.

Berkaitan dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Periode 2010-2015 pada tanggal 25 Oktober 2010, maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2015. RPJMD dimaksud merupakan dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan yang





selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Padang Pariaman dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2010-2015.

RPJMD tersebut, disusun berdasarkan Visi dan Misi Bupati Padang Pariaman, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat dalam lingkup wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu RPJMD ini juga menjawab tiga pertanyaan dasar, yakni: (1) kemana Kabupaten Padang Pariaman akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

#### **A. VISI DAN MISI**

Dari berbagai macam isu strategis pada semua urusan penyelenggaraan Pemerintahan, yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam jangka menengah (2010-2015) adalah sebagaimana tertuang dalam “Visi dan Misi pembangunan” yaitu :

##### **1. Visi**

Visi adalah kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, maka Visi Kabupaten Padang Pariaman periode Tahun 2010 - 2015 adalah sebagai berikut:

***“Menjadi Kabupaten Unggul Dalam Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Cerdas dan Sejahtera”***



Visi tersebut memiliki empat kunci pokok yakni Menjadikan Kabupaten yang unggul, Masyarakat Religius, Mewujudkan Masyarakat Cerdas, dan Masyarakat yang Sejahtera, secara lebih terperinci dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. *Kabupaten Unggul* yang dimaksud adalah suatu daerah yang mempunyai Kemampuan menciptakan dan memelihara suatu lingkungan yang dapat mempertahankan daya saing di daerah. Kemampuan daerah untuk menghasilkan nilai tambah secara berhasil dalam persaingan nasional, regional dan/atau internasional. Dalam waktu bersamaan masyarakat di daerah yang bersangkutan juga menikmati suatu standar hidup yang meningkat dan berkelanjutan serta pendapatan riil yang meningkat.
- b. *Masyarakat Religius* yang dimaksudkan disini adalah Suatu masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh kepada ajaran agama, dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari dalam berintegrasi sesama anggota masyarakat.
- c. *Cerdas* dalam hal ini dimaksudkan adalah suatu kondisi masyarakat yang berkualitas dan berilmu pengetahuan maka untuk mewujudkannya dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan yang dilihat dari ketersediaan sarana dan Prasarana pendidikan, peningkatan program dan kualitas pendidikan disemua tingkatan dan berkelanjutan.
- d. *Sejahtera* dalam hal ini dimaksudkan adalah suatu kondisi masyarakat yang sudah cukup makmur yang ditandai oleh pendapatan masyarakat yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar, berkurangnya tingkat pengangguran dan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sejahtera dalam visi ini, mengarah pada tujuan terlayani dan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup dan rasa aman dan tentram serta adil dalam segala bidang.



## **2. Misi**

Untuk mencapai Visi “Menjadi Kabupaten Unggul Dalam Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Cerdas dan Sejahtera” ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kehidupan beragama dan berbudaya yang berkualitas berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.
- b. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi mutu berbasiskan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat.
- c. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkeperibadian wirausaha.
- d. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang tangguh dan berdaya saing berbasiskan sistem agribisnis dan agroindustri.
- e. Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

## **B. TUJUAN DAN SASARAN**

Hubungan antara tujuan, sasaran dan keterkaitannya dengan strategi dan arah kebijakan untuk tiap-tiap misi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



**Tabel 2.1**  
**Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi I**

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
<b>MISI I : " Mewujudkan kehidupan beragama dan berbudaya yang berkualitas berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"</b>							
1	Peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan melalui pemeliharaan kerukunan hubungan antar dan inter umat beragama serta fasilitasi sarana prasarana peribadatan	1	Meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan	1	Meningkatkan akses informasi keagamaan	1	Mengaktifkan wirid-wirid dan pesantren ramadhan
		2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan keagamaan	1	Optimalisasi fungsi rumah ibadah dan peran alim ulama	1	Meningkatkan kualitas pengelolaan rumah ibadah Meningkatkan insentif guru TPA/MDA, Gharin, Imam dan khatib
2	Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya tradisional, bangunan bersejarah serta benda cagar budaya dalam rangka memperkuat identitas dan jati diri masyarakat	1	Meningkatkan sarana prasarana dan Pelestarian seni dan budaya tradisional	1	Peningkatan fasilitas seni dan budaya	1	Merevitalisasikan kawasan tradisional dan bersejarah
						2	Melestarikan Situs bersejarah dan cagar budaya
		2	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam pelestarian seni dan kekayaan budaya lokal	1	Peningkatan event seni dan budaya	1	Membina kesenian tradisional
				2	Optimalisasi peran lembaga adat	1	Meningkatkan Kapasitas lembaga adat dan budaya



**Tabel 2.2**  
**Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi II**

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN			
<b>MISI II : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi mutu berbasis sinergitas antara pemerintah dan masyarakat.</b>									
1	Terwujudnya Pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel	1	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintahan yang bersikap dan berperilaku anti korupsi, kolusi dan nepotisme, responsif, transparan, akuntabel serta beretika, dan berwibawa	1	Penerapan dan Implementasi Good Governance	1	Penciptaan budaya disiplin, tertib dan aman		
				2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Ketrampilan serta Profesional Aparatur	1	Mengembangkan Diklat Aparatur		
				3	Peningkatan Pengelolaan Kepegawaian	2	Penempatan Pegawai sesuai dengan kompetensi		
		2	Meningkatnya Opini BPK terhadap laporan keuangan		1	Peningkatan manajemen keuangan	1	Pengembangan sistem informasi terpadu	
					2	Meningkatkan optimalisasi pengelolaan aset daerah dengan penekanan pada ketersediaan data aset yang akurat	1	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						2	Meningkatkan optimalisasi pengelolaan aset daerah dengan penekanan pada ketersediaan data aset yang akurat	1	Peningkatan manajemen aset daerah dan daerah terpadu
						2	Meningkatkan optimalisasi pengelolaan aset daerah dengan penekanan pada ketersediaan data aset yang akurat	2	Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah terpadu
					3	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	3	Peningkatan kualitas laporan keuangan	
						1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	1	Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah terpadu
						2	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	1	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan sumber –sumber pendapatan yang sah
4	Meningkatkan Pegawai internal		1	Meningkatkan Pegawai internal	2	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah			
			2	Meningkatkan Pegawai internal	1	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan penganggaran pembangunan			
						2	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan lembaga pemerintah daerah		



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN			
<b>MISI II : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi mutu berbasis sinergitas antara pemerintah dan masyarakat.</b>									
						3	Meningkatnya kemampuan penanganan kasus		
2	Terwujudnya Pelayanan Prima	1	Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan	1	Reformasi Pelayanan sektor publik	1	Penerapan standar pelayanan minimal		
						2	Pengembangan <i>e-goverment</i>	1	Pengembangan data dan informasi berbasis IT
								2	Peningkatan keterbukaan informasi publik
								3	Peningkatan publikasi dan dokumentasi produk-produk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
						3	Meningkatnya hubungan komunikasi timbal balik antara pemerintah, masyarakat dan media massa	1	Peningkatan hubungan pemerintah dengan masyarakat dan media masa
								2	Terpublikasinya penyelenggaraan pemerintah daerah secara proporsional dan efektif
						4	Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan	1	Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan
2	Peningkatan Pelayanan dan SDM Perpustakaan dan Arsip								
5	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah guna mewujudkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah	1	Melakukan Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah						



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>MISI II : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi mutu berbasis sinergitas antara pemerintah dan masyarakat.</b>			
		6 Meningkatkan Efektifitas Penerapan Peraturan Daerah	1 Meningkatkan jumlah dan kualitas Peraturan Daerah
		7 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Eksekutif dan legislatif	1 Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan
			2 Fasilitasi penguatan pelayanan kebijakan kepala daerah dan wakil kepala daerah
			3 Penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintahan Nagari
			4 Penguatan Otonomi Pemerintahan Nagari
		8 Meningkatkan efektifitas pelayanan	1 Meningkatkan Pelayanan masyarakat ke arah satu pintu
		9 Meningkatkan kualitas data base kependudukan	1 Pembangunan Data base Kependudukan
			2 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
			3 Penerapan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan
		10 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik	1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik
		11 Fasilitasi peran dan fungsi lembaga legislatif;	1 Menfasilitasi peran dan fungsi lembaga legislatif;
		12 Pengembangan hubungan kemitraan eksekutif dan legislatif;	1 Mengembangkan hubungan kemitraan eksekutif dan legislatif;



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
<b>MISI II : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi mutu berbasis sinergitas antara pemerintah dan masyarakat.</b>							
				13	Peningkatan jumlah Poskamling yang aktif dan berfungsi dengan baik.	1	Meningkatkan jumlah Poskamling yang aktif dan berfungsi dengan baik.
				14	Penurunan kasus/kejadian Pelanggaran Kamtibmas	1	Menurunkan kasus/kejadian Pelanggaran Kamtibmas
				15	Meningkatkan Peran aktif masyarakat dalam Pengamanan Lingkungan	1	Peran aktif masyarakat dalam Pengamanan Lingkungan
				16	Peningkatan peran dan fungsi politik Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1	Meningkatnya peran dan fungsi politik Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
		2	Meningkatnya kemampuan kapasitas aparatur dalam pelayanan publik	1	Meningkatkan kualitas SDM Aparatur	1	Mengikutsertakan aparatur pada Pelatihan dan Bimbingan Teknis
3	Terwujudnya Pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif	1	Meningkatnya perencanaan partisipatif dalam penyelenggaraan pembangunan	1	Pengembangan sistem perencanaan daerah yang partisipatif	1	Peningkatan kualitas musrenbang
				2	Peningkatan koordinasi perencanaan pembangunan	1	Fasilitasi dan Singkronisasi antara perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan serta pengendalian pembangunan daerah
						2	Penguatan kapasitas kelembagaan perencana
						3	Tersedianya data dan informasi statistik



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>MISI II : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi mutu berbasis sinergitas antara pemerintah dan masyarakat.</b>			
		3 Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat	1 Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan nagari 2 Memantapkan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan
		4 Meningkatkan partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan	1 Peningkatan pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat 2 Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat
		5 Meningkatkan pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya	1 Peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat nagari 2 Mendorong pendayagunaan teknologi tepat guna bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam 3 Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan
		6 Meningkatkan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	1 Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna 2 Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat



**Tabel 2.3**  
**Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi III**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
<b>MISI III : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkeperibadian wirausaha.</b>				
1 Terwujudnya sumberdaya manusia berkualitas	1 Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses pelayanan pendidikan	1 Meningkatkan Prosentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan sekolah	1 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	
		2 Pengembangan kualitas layanan pendidikan	1 Meningkatnya kualifikasi guru	
	2 Meningkatnya angka melek huruf	1 Meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan	1 Pengembangan pendidik non formal	1 Pengembangan pendidik non formal
			2 Mengembangkan PKBM dan lembaga ketrampilan	2 Mengembangkan PKBM dan lembaga ketrampilan
			3 Memfasilitasi pengembang belajar paket A,B,C	3 Memfasilitasi pengembang belajar paket A,B,C
			4 Peningkatan pelayanan belajar paket A,B ,C	4 Peningkatan pelayanan belajar paket A,B ,C
	3 Meningkatnya kualitas pendidikan	1 Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan serta Kualifikasi Guru	1 Peningkatan kompetensi tenaga pendidik	1 Peningkatan kompetensi tenaga pendidik
			2 Peningkatan pengawasan dan manajemen pendidikan	2 Peningkatan pengawasan dan manajemen pendidikan
			3 Peningkatan pemerataan kesempatan penyetaraan dan peningkatan kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan	3 Peningkatan pemerataan kesempatan penyetaraan dan peningkatan kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan
		2 Meningkatkan mutu, kualitas dan Manajemen pendidikan	1 Meningkatkan Akses Pendidikan Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	1 Meningkatkan Akses Pendidikan Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
2 Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa	2 Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa			





TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
<b>MISI III : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkeperibadian wirausaha.</b>				
		3 Pengembangan IT dalam pendidikan	1 Akses internet di sekolah	
		4 Meningkatkan kualitas pendidikan yang berbasis teknologi dan multi media.	1 Pengembangan pendidikan berbasis teknologi dan multi media.	
		5 Pengembangan pendidikan non formal dan informal	1 Memfasilitasi Fasilitas kegiatan PKBM dan lembaga pendidikan ketrampilan (sanggar belajar)	
	4 Meningkatkan prestasi pemuda dan olah raga	1 Peningkatan prestasi olahraga	1 Pembinaan atlet dan pelaku olahraga	
		2 Terwujudnya sarana dan prasarana olah raga yang representatif	1 meningkatkan sarana dan prasarana olah raga	
		3 Meningkatkan Pembinaan dibidang Pemuda	1 Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan	2 Fasilitasi penguatan kelembagaan dan kegiatan
			3 Pengembangan Jiwa kepeloporan dan kemandirian pemuda	
			4 Meningkatkan Kompetisi Olahraga Prestasi dan Olahraga Masyarakat Secara Terarah dan Berjenjang	1 Meningkatnya persentase pencapaian prestasi olahraga
		3 Fasilitasi dan partisipasi event-event olahraga.		
		5 Meningkatkan status kesehatan masyarakat	1 Peningkatan akses dan cakupan serta mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat	1 Meningkatnya rasio sarana pelayanan umum kesehatan
	2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan			



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>MISI III : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkeperibadian wirausaha.</b>			
			3 Meningkatkan rasio medis kesehatan
			4 Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat serta alat kesehatan
		2 Terciptanya Pelayanan Rumah Sakit yang bermutu dan profesional kepada masyarakat	1 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, baik dalam hal penguasaan ilmu dan teknologi, perilaku serta keterampilan teknis
			2 Melakukan standarisasi mutu pelayanan melalui klasifikasi tipe dan akreditasi
		3 Peningkatan pengelolaan RS yang aman dan bersinergis dengan lingkungan masyarakat	1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana rumah sakit serta sarana penunjang
			2 Melakukan pembenahan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana rumah sakit
		4 Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan	1 Optimalisasi terhadap akses dan kualitas pelayanan kesehatan
			2 Menyederhanakan dan mempersingkat prosedur pelayanan rumah sakit
		5 Peningkatan status kesehatan keluarga meliputi kesehatan ibu, anak, lansia dan gizi	1 Meningkatkan akses dan jangkauan serta kualitas pelayanan kesehatan keluarga/masyarakat
			2 Peningkatan penanganan status gizi keluarga/ masyarakat
			3 Peningkatan jangkauan mutu pelayanan kesehatan keluarga (ibu, anak, lansia)



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
<b>MISI III : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkeperibadian wirausaha.</b>					
		6	Penurunan prevalensi gizi buruk	1	Peningkatan kualitas gizi masyarakat
		7	Peningkatan upaya pengendalian penyakit menular, tidak menular	1	Meningkatkan upaya pencegahan dan penurunan angka kesakitan masyarakat
				2	Peningkatan sistem surveilance penyakit menular dan tidak menular yang berkembang di masyarakat
		8	Meningkatnya upaya Promosi dan Pemberdayaan masyarakat	1	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan perilaku hidup sehat
				2	Peningkatan advokasi yang lebih membantu kelompok masyarakat miskin
		9	Meningkatnya Upaya Pelayanan dan Pemulihan Kesehatan Masyarakat	1	Meningkatkan Pemerataan pelayanan kesehatan
				2	Meningkatkan kualitas layanan puskesmas
				3	Meningkatkan kualitas penyehatan lingkungan
				4	Meningkatkan pemberdayaan dan penyuluhan kesehatan lingkungan
				5	Pemberdayaan dan penyuluhan kesehatan lingkungan
		10	Mempercepat penurunan angka kematian Ibu (AKI) hamil, menyusui dan nifas serta angka kematian bayi (AKB)	1	Terlaksananya Fasilitasi dan Sosialisasi Kecamatan Sayang Ibu (KSI)
				2	Meningkatkan kualitas hidup perempuan terutama dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>MISI III : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkeperibadian wirausaha.</b>			
			3 PEMBERDAYAAN kader posyandu
		11 Meningkatkan peran aktif masyarakat, swasta dalam pembangunan kesehatan	1 Pembinaan dan pengawasan terhadap klinik kesehatan dan peredaran obat dan makanan
	6 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin	1 Meningkatkan upaya Pelayanan dan Pemulihan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin	1 Mengembangkan kemitraan dengan penyedia pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
			2 Peningkatan advokasi yang lebih membantu kelompok masyarakat miskin
	7 Pengarusutamaan Gender dan hak anak	1 Meningkatkan pemerataan penyuluhan KDRT dan masyarakat	1 Penyuluhan /Sosialisasi pada Siswa sekolah sampai pada masyarakat di nagari
			2 Melaksanakan fasilitasi dan advokasi PUG bagi Perempuan
		2 Meningkatkan pengetahuan dan wawasan perempuan-perempuan diNagari percontohan	1 Terlaksananya Fasilitasi dan Sosialisasi Kecamatan Sayang Ibu (KSI)
		3 Meningkatkan kualitas Perempuan Politik dalam menghadapi pemilu	1 Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perempuan politik di Legislatif
	8 Memperlambat Laju Pertumbuhan Penduduk	1 Meningkatkan partisipasi masyarakat dan Institusi masyarakat dalam program KB, KS	1 Pengembangan dan peningkatan penyediaan pelayanan KB, KS
			2 Fasilitasi kegiatan promotif dan kaderisasi KB, KS
		2 Meningkatkan Kesehatan Reproduksi bagi Masyarakat	1 Peningkatan kesadaran reproduksi sehat, keluarga berencana dan keluarga sejahtera



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>MISI III : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkeperibadian wirausaha.</b>			
		3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
		4	Meningkatkan penanganan, pelayanan dan rehabilitasi PMKS
			1
			2
2	1	1	1
Terwujudnya sumberdaya manusia berjiwa wirausaha	Mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas, produktifitas dan berdaya saing tinggi dengan pelatihan keterampilan berorientasi penempatan dan kemandirian tenaga kerja.	Peningkatan kemandirian, perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja	1
		2	2
			1
			2
			1
			2

**Tabel 2.4**  
**Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi IV**

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
<b>MISI IV: Mewujudkan pembangunan ekonomi yang tangguh dan berdaya saing berbasis sistem agribisnis dan agroindustri</b>							
1	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berbasis agribisnis	1	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan perikanan	1	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan dan perikanan	1	Membangun dan memelihara infrastruktur serta sarana dan prasarana pendukung
				2	Penerapan sistim pertanian modern, intensifikasi dan optimalisasi lahan terlantar dan pekaragan serta penerapan teknologi pertanian	1	Meningkatnya Jumlah Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
						2	Peningkatan, Perluasan dan Peremajaan Tanaman Perkebunan
				3	Peningkatan Produksi Ternak	1	Meningkatnya Populasi Ternak
				4	Peningkatan Produksi Perikanan	1	Meningkatnya Produksi Perikanan
				2	Peningkatan Kawasan Konservasi dan Budidaya Perikanan		
		2	Meningkatkan Pendapatan Petani	1	Peningkatan Kapasitas Petani , Kelembagaan Petani dan Pelaku Agribisnis	1	Peningkatan Kualitas SDM Pertanian dan Perikanan
				2	Meningkatnya daya saing produk Pertanian dan Perikanan	1	Pembinaan dan Peningkatan Teknologi Petanian
				3	Pemberdayaan Tenaga Penyuluh	1	Peningkatan Kapasitas Penyuluh
						2	Peningkatan Jumlah Kelompok Binaan



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
<b>MISI IV: Mewujudkan pembangunan ekonomi yang tangguh dan berdaya saing berbasis sistem agribisnis dan agroindustri</b>							
2	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berbasis agroindustri	1	Meningkatnya pengolahan produk pertanian, perkebunan dan perikanan	1	Pengembangan industri pengolahan berbasis komoditi unggulan	1	Pengembangan produk olahan dan pemasaran bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil pertanian dan perikanan
						2	Fasilitasi pengembangan industri pengolahan
		2	Berkembangnya usaha mikro, kecil dan koperasi	1	Pengembangan akses pelayanan dan sumber pendanaan Koperasi dan UMKM,	1	Meningkatkan kemudahan permodalan bagi UMKM dan Koperasi
						2	Peningkatan kemitraan bisnis bagi UMKM dan Koperasi
3	Pengembangan kualitas SDM UMKM dan koperasi	1	Peningkatan keterampilan dan manajemen pelaku UMKM dan Koperasi				
3	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan	1	Meningkatnya jumlah sentra produksi produk unggulan daerah	1	Mengembangkan sentra produksi komoditi unggulan dengan menggunakan pendekatan wilayah dan kawasan	1	Pengembangan Komoditi Unggulan
						2	Penataan dan Pembinaan Pedagang kaki lima di pasar tradisional
		2	Meningkatnya investasi berbasis ekonomi kerakyatan	1	Pengembangan kebijakan investasi	1	Peningkatan pelayanan investasi dan kejelasan regulasi
4	Terwujudnya pembangunan industri pariwisata	1	Meningkatnya kualitas objek wisata unggulan	1	Pengembangan destinasi pariwisata	1	Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
<b>MISI IV: Mewujudkan pembangunan ekonomi yang tangguh dan berdaya saing berbasis sistem agribisnis dan agroindustri</b>							
		2	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	1	Pengembangan kualitas obyek dan event-event pariwisata	1	Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
						2	Peningkatan pengelolaan objek wisata
						3	Pembinaan terhadap masyarakat sekitar objek wisata
		3	Berkembangnya Kawasan Wisata Kuliner	1	Mengembangkan kawasan wisata kuliner	1	Menata dan mengelola kawasan wisata kuliner
		4	Berkembangnya Kawasan Wisata Religi	1	Mengembangkan kawasan wisata Religi	1	Menata dan mengelola kawasan wisata religi
5	Berkurangnya penduduk miskin dan daerah tertinggal	1	Menurunnya tingkat kemiskinan dan daerah tertinggal	1	Peningkatan sarana dan prasarana daerah tertinggal	1	Meningkatnya sarana dan prasarana pada daerah tertinggal
				2	Pemberdayaan masyarakat miskin	1	Peningkatan kapasitas masyarakat miskin



**Tabel 2.5**  
**Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi V**

	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
<b>MISI V : Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan</b>					
1	Terwujudnya pembangunan berkelanjutan	1 Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana Ibukota Kabupaten	1 Percepatan pembangunan infrastruktur dan sarana perkantoran pemerintahan	1 Pembangunan kantor pemerintahan di kawasan ibukota kabupaten	
				2 Pembangunan sarana Pendukung Pusat Pemerintahan	
				3 Pembangunan infrastruktur dan utilitas kawasan ibukota kabupaten	
		2 Membangun Wilayah strategis dan cepat tumbuh	1 Pengembangan pusat pertumbuhan dan kawasan strategis	1 Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	
				2 Membangun Wilayah strategis dan cepat tumbuh	1 Lanjutan pembangunan mesjid makam syekh Burhanuddin
					2 lanjutan pembangunan water boom
		3 Menurunnya ketimpangan pembangunan antar wilayah	1 Mendorong pertumbuhan pembangunan wilayah sesuai dengan potensinya	1 Pelaksanaan pembangunan yang terpadu, sinergi dan terintegrasi	
				2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana jaringan jalan	1 Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan
					3 Meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi para pengguna jasa transportasi
				2 Pemeliharaan prasarana perhubungan	
		3 Pengaturan trayek angkutan umum;			
		4 Pembangunan terminal;			



	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>MISI V : Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan</b>				
				5 Penyediaan sarana prasarana perhubungan dan informasi fasilitas transportasi
				6 Penyediaan sarana /Rambu-rambu lalu lintas
				7 Peningkatan Fasilitas Terminal
				8 Pembangunan Terminal Tipe B
				9 Pembangunan Terminal Truk
				10 Pengawasan dan pengujian kelayakan terhadap kendaraan umum/kendaraan masal dan kedaraan barang
			4 Meratanya pelayanan teknologi komunikasi dan informatika di setiap Nagari	1 Pengaturan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika
		4 Peningkatan Sarana Penunjang Ekonomi	1 Meningkatnya pengelolaan sarana irigasi dalam rangka meningkatkan produktifitas pertanian	1 Fasilitasi dan bantuan pemeliharaan sumber air milik masyarakat;
				2 Penguatan kelembagaan masyarakat pengelola air.
2	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	1 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	1 Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pelestarian lingkungan	1 Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tentang pelestarian lingkungan hidup
			2 Meningkatnya implementasi Amdal , UKL dan UPL setiap penanggung jawab kegiatan	1 Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>MISI V : Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan</b>			
			2 Penyusunan dokumen Amdal, UKL dan UPL bagi setiap penanggung jawab kegiatan
			3 Meningkatkan kebersihan dan penghijauan lingkungan
		3 Menekan tingkat kerusakan lingkungan hidup dari pihak yang tidak bertanggung jawab	1 Peningkatan Pengawasan dan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup
		4 Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan	1 Pelestarian Lingkungan hidup
		5 Memulihkan lahan kritis, lahan bekas tambang galian c, kawasan pantai, kawasan konservasi dan sumber daya alam.	1 Pemulihan Lahan kritis, lahan bekas tambang galian c, kawasan pantai, kawasan konservasi dan sumber daya alam
		6 Meningkatnya cakupan skala pelayanan penanganan sampah	1 Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah
		7 Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi kawasan melalui penataan kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam RTRW	1 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi kawasan
	5 Meningkatnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana	1 Membangun sarana dan prasarana pada kawasan rawan bencana	1 Pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
		2 Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Kepedulian Masyarakat, terhadap Bencana Meningkatnya	1 Peningkatan fasilitas Jalur Evakuasi



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>MISI V : Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan</b>			
		3 Pengurangan Resiko Bencana	1 Sosialisasi pengurangan resiko bencana dan Mitigasi Bencana
		3 Mempercepatan penyaluran Bantuan Rehab Rekon Rumah Masyarakat Pasca Gempa 30 September 2009	1 Percepatan penyaluran Bantuan Rehab Rekon Rumah Masyarakat Pasca Gempa 30 September 2009
	2 Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan	1 Pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Alam	1 Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemanfaatan sumber daya alam
			2 Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan sumber daya alam



### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Padang Pariaman Tahun Anggaran 2010-2015 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2011. Setelah RPJMD tersebut disusun pada tahun 2014 ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2014, sehingga tersusunlah perjanjian kinerja Bupati Padang Pariaman tahun anggaran 2015.

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Bupati. Dengan demikian, penetapan kinerja ini menjadi target kinerja yang harus diwujudkan oleh Bupati dan pada akhir tahun akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pemerintahan daerah. Perjanjian Kinerja Bupati Padang Pariaman TA. 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Bupati Padang Pariaman TA. 2015**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan	Peringkat Dalam MTQ Tingkat Sumbar	peringkat 5
		Peningkatan Majelis Taklim Aktif	0.04%
		Peningkatan Jama'ah Haji Daerah	90.00%
2	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintahan yang bersikap dan berperilaku anti korupsi, kolusi dan nepotisme, responsif, transparan, akuntabel serta beretika, dan berwibawa	Opini BPK	WTP
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	B
3	Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses pelayanan pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	8,4%
		Angka Melek Huruf	99%





4	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	72.56
5	Mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas, produktifitas dan berdaya saing tinggi dengan pelatihan keterampilan berorientasi penempatan dan kemandirian tenaga kerja.	Tingkat pengangguran terbuka	9.38%
		Tingkat partisipasi angkatan kerja	3,2%
6	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan perikanan	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ha)	5.79
		Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	20.46
		Produksi perikanan tangkap (ton)	24,444.50
		Produksi perikanan budidaya (ton)	23,879
		Tingkat Pendapatan pembudidaya/bulan (Rp.)	2,415,765
		Tingkat Pendapatan nelayan/bulan (Rp)	1,656,604
		Persentase kontribusi usaha perikanan terhadap PDRB	5%
7	Berkembangnya usaha mikro, kecil dan koperasi	Jumlah Koperasi Sehat	10
		Jumlah UMKM yang aktif	11,250
8	Meningkatnya investasi berbasis ekonomi kerakyatan	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	333 M
9	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Kunjungan wisata (jumlah orang)	3600 orang
10	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan	Persentase peningkatan hutan rakyat	112 Ha



## I. BAB III

### II. AKUNTABILITAS KINERJA



#### Perencanaan Kinerja berisi :

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Capaian Indikator Kinerja Utama
- C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- D. Realisasi Keuangan
- E. Capaian Prestasi dan Penghargaan

**M**anajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah berorientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Dalam Bab III ini akan diuraikan: (1) Pengukuran Kinerja (2) Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 (3) Evaluasi dan Analisis Capaian.

#### A. PENGUKURAN KINERJA



Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Kinerja}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

**Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal**

<b>Skala Ordinal (%)</b>	<b>Predikat / Kategori</b>
≥85	Sangat Berhasil
70 s.d. <85	Berhasil
51 s.d. < 70	Cukup Berhasil
< 51	Tidak Berhasil



## **B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Secara umum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011-2015. Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015 sebagai berikut :





Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 22 indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa 18 indikator dikategorikan "sangat berhasil", 2 indikator dikategorikan "Berhasil", dan 2 indikator dikategorikan "Cukup Berhasil".

### **C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya target yang ditetapkan. Hingga akhir tahun 2015 yang merupakan akhir tahun RPJMD 2011-2015, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah berupaya untuk mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2014 telah ditetapkan 10 sasaran strategis untuk mencapai misi dan tujuan tersebut, sedangkan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis tersebut digunakan 21 indikator kinerja utama. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 10 (sepuluh) sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

#### **Sasaran Strategis 1**

**Meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan**

Sasaran strategis 1 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2011-2015 yaitu **"Mewujudkan kehidupan beragama dan berbudaya yang berkualitas berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"** Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama. Capaian kinerja



sasaran strategis 1 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.3 Pengukuran Sasaran Strategis 1**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Relisasi Tahun 2014	Tahun 2015			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Peringkat dalam MTQ Tingkat Sumbar	Peringkat	-	5	8	40	Cukup Berhasil

Capaian indikator Peringkat dalam MTQ Sumbar ini hanya berhasil meraih 40% nilai capaian, dengan kategori **cukup berhasil**.

**Tabel 3.4 Pengukuran Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja Utama 2 dan 3**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Relisasi Tahun 2014	Tahun 2015			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Peningkatan Majelis Taklim Aktif	%	0	0,04	0,83	2.075	Sangat berhasil
2	Peningkatan Jama'ah Haji Daerah	%	178	90	153	170	Sangat berhasil

Sementara itu Capaian realiasi peningkatan Majelis Taklim Aktif dan Peningkatan Jama'ah Haji Daerah melewati 100% bahkan capaian Majelis Taklim yang aktif malahan 2.075%. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan 2 indikator di atas masyarakat Kabupaten Padang Pariaman mengalami peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan. Meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan.

Sementara itu nilai capaian sasaran 1 juga mengalami naik dan turun selama rentang waktu 2011 s/d 2015. Hal itu dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.5 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis 1**

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Th. 2011	Realisasi Th. 2012 (*)	Realisasi Th. 2013	Realisasi Th. 2014 (*)	Realisasi Th. 2015
1	Peringkat dalam MTQ Tingkat Sumbar	11	- (*)	15	- (*)	8
2	Peningkatan Majelis Taklim Aktif	0.00 (**)	0.00 (**)	0.02	0 (**)	0.83
3	Peningkatan Jama'ah Haji Daerah	94.81	83.00	123.29	86.00	175.00





Keterangan :

\*MTQ tingkat Sumbar dilaksanakan hanya 2 kali dalam setahun. Sehingga tidak ada realisasi peringkat pada tahun 2012 dan 2014

\*\*Pada tahun tersebut tidak ada realisasi karena tidak ada pengangara sehingga, kondisi majlis taklim yang aktif tidak terpantau pada tahun tersebut

Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman telah berupaya secara maksimal untuk mencapai peringkat 5 dalam MTQ tingkat Sumatera Barat (Sumbar). Melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman bersama mitra kerja LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an) melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian target tersebut diatas. Adapun kegiatan dimaksud yaitu :

#### 1. Pembinaan Fasilitas Pelaksanaan MTQ

Kegiatan ini diawali dengan proses seleksi bagi khafilah yang akan mengikuti MTQ Provinsi ke-36 tingkat Provinsi Sumatera Barat. Seleksi ini diadopsi dari hasil MTQ ke-43 tingkat Kabupaten Padang Pariaman



Gambar 3.1 Pelepasan Kalifah Padang Pariaman Pada MTQ Nasional ke-36

ditambah dari proses seleksi awal yang dilaksanakan diawal tahun yaitu pada bulan Februari. Setelah proses seleksi selesai, selanjutnya dilaksanakan TC (*Training Center*) selama setahun penuh kepada 56 khafilah disemua cabang perlombaan MTQ. TC dilatih oleh pelatih kabupaten dan pelatih provinsi yang dilakukan setiap minggu, kemudian kegiatan ini juga digunakan untuk fasilitasi pemberangkatan dan pelaksanaan pertandingan pada MTQ ke-36 tingkat Provinsi Sumatera Barat di Kota Sawahlunto tanggal 7-14 November 2015. Hasilnya Kabupaten Padang Pariaman memperoleh peringkat ke-8 dari 19 Kabupaten/Kota yang mengikuti ajang MTQ tersebut.



## 2. Pembinaan Qori -Qori'ah Kabupaten Padang Pariaman

Kegiatan ini ditujukan untuk melakukan pembinaan bagi Qori -Qori'ah se-Kabupaten Padang Pariaman sekaligus penunjang pelaksanaan TC pada kegiatan pembinaan fasilitasi pelaksanaan MTQ. Kedepannya akan dilakukan pembinaan yang lebih intensif agar Qori-Qori'ah



Kabupaten Padang Pariaman memiliki bekal yang lebih mempunyai untuk menghadapi MTQ tingkat Sumbar selanjutnya. Ajang MTQ tingkat Kecamatan dan Kabupaten harus dimaksimalkan untuk menyaring Qori -Qori'ah yang lebih berpotensi, sehingga hal ini dapat memberikan pengaruh yang signifikan nantinya dalam peraihan peringkat Kabupaten Padang Pariaman dalam MTQ tingkat Sumbar.

### ❖ Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran 1 adalah:

- a. Berdirinya MAN Cendekia di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang. Penerimaan siswa tahun 2016 dengan syarat calon siswa wajib hafal 1 juzz Al-Qur'an.
- b. Berdirinya rumah tahfidz Al-Qur'an di setiap kecamatan sebagai wadah bagi calon siswa untuk menghafal 1 juzz.
- c. Adanya harapan agar anak-anak (generasi muda) hafal Al-Qur'an
- d. Melakukan pembinaan generasi muda yang hafidz dan hafidzah.
- e. Adanya perlombaan MTQ tingkat kecamatan dan tingkat Kabupaten Padang Pariaman.
- f. Sosialisasi ke seluruh pengurus Majelis Taqlim dengan harapan kegiatan Majelis Taqlim menjadi hidup.
- g. Fasilitasi keberangkatan dan kepulangan jamaah haji oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terlaksana dengan baik.

### ❖ Hambatan dan Masalah

- a. Banyaknya kafilah Kabupaten Padang Pariaman yang berprestasi mewakili daerah lain.



- b. Uang saku dan bonus yang diterima di daerah lain lebih besar.
- c. Guru (tenaga pengajar) pada rumah tahfidz kurang berkompeten.
- d. Hubungan pengurus Majelis Taqlim dengan Pemerintah Kabupaten kurang intens.
- e. Pengurangan kuota di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Padang Pariaman karena kondisi Arab Saudi tengah melakukan renovasi.
- f. Adanya jamaah Haji yang mengundurkan diri karena sakit.

❖ **Strategi pemecahan masalah:**

- a. Meningkatkan uang saku dan bonus bagi kafilah, agar tidak beralih mewakili daerah lain.
- b. Memberikan fasilitas pendukung yang memadai kepada kafilah yang mewakili Kabupaten Padang Pariaman.
- c. Meningkatkan kompetensi guru rumah tahfidz.
- d. Memberikan gaji yang sesuai kepada guru (pengajar) di rumah tahfidz.
- e. Melengkapi rumah tahfidz dengan sarana dan prasarana yang memadai.

**Sasaran Strategis 2**

**Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintahan yang bersikap dan berperilaku anti korupsi, kolusi dan nepotisme, responsif, transparan, akuntabel serta beretika, dan berwibawa.**

Sasaran Strategis 2 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi II yaitu “**Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi mutu berbasis sinergitas antara pemerintah dan masyarakat**” Untuk mengukur capaian Sasaran strategis digunakan 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu Opini BPK dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Untuk capaian indikator Opini BPK didukung oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) dan Inspektoriah Kantor Kabupaten Padang Pariaman. Sementara itu untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah dilakukanlah Survey Indeks Kepuasan



Masyarakat oleh Bagian Organisasi dan PAN pada Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Hasil capaian indikator kinerja utama pada Sasaran Strategis 2 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.6 Penilaian Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 2**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Relisasi Tahun 2014	Tahun 2015			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	100	Sangat Berhasil
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	B	B	B	100	Sangat Berhasil



## 1. Opini BPK

Nilai target dan capaian dari Opini BPK adalah dalam bentuk penilaian kualitatif, sehingga perlu dikwantitifkan dengan cara memberikan skor untuk setiap target dan capaian. Hasil dari setiap Opini BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan terdiri dari 4 (empat) penilaian, yaitu Tidak Menyatakan Pendapat, Tidak Wajar, Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Skor dari masing-masing opini tersebut ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 3.7 Skor Hasil Opini BPK**

No	Jenis Opini BPK	Skor
1	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	4
2	Wajar dengan Pengecualian (WDP)	3
3	Tidak Wajar	2
4	Tidak Menyatakan Pendapat	1

Dari skor yang telah ditetapkan, maka dapat dihitung nilai capaian dari indikator Opini BPK ini. Nilai capaian indikator Opini BPK ini adalah 100% dengan kategori **sangat berhasil**. Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang



Gambar 3.3 Penerimaan Penghargaan WTP

akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi keuangan.

dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian oleh BPK menjadi komponen penting untuk menilai sejauh mana penilaian yang obyektif bisa dilakukan terhadap



Pemeriksaan oleh BPK dilakukan dengan dasar hukum UU No. 15 tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap tahunnya ini mencakup pemeriksaan terhadap Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka menjalankan amanah yang tertuang dalam undang-undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mendorong semua aparatur sipil negara untuk bekerja dan mengabdikan serta menjalankan tugas secara transparan, beretika dan jauh dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Oleh sebab itu, maka Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menargetkan realisasi capaian kinerja pada tingkat yang terbaik yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pada kondisi periode RPJMD Tahun 2010 Opini BPK terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah WDP. Perkembangan Opini BPK di Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2011 s/d 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.8 Opini BPK terhadap LKPD Kabupaten Padang Pariaman**

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Th. 2011	Realisasi Th. 2012 (*)	Realisasi Th. 2013	Realisasi Th. 2014 (*)	Realisasi Th. 2015
1	Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP

## 2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Salah satu faktor utama dalam mewujudkan pemerintahan bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan







Gambar 3.4 MoU antara Pemda Padang Pariaman dengan PT. Pos mengenai pengiriman KTP dan Akte pada Disdukcapil

kepastian hukum. Oleh karena itu, perlu diketahui persepsi dari pengguna layanan terhadap setiap pelayanan di SKPD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Dengan harapan agar seluruh instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dapat lebih maju melayani kebutuhan dan respon dari masyarakat. Untuk mengetahui persepsi masyarakat kabupaten Padang Pariaman yang merupakan pengguna layanan maka dilakukannlah Survey Indeks Kepuasan Masyarakat.

Pelaksanaan Survey indeks kepuasan masyarakat mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Disamping itu, juga ditunjang dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Pengukuran nilai indeks kepuasan masyarakat telah dilaksanakan pada tahun 2012, 2013, 2014 dan tahun 2015. Hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.9 perbandingan nilai IKM tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015**

<b>NO</b>	<b>Tahun</b>	<b>Nilai IKM</b>	<b>Mutu Pelayanan</b>	<b>Kinerja Unit Pelayanan</b>
1	2012	71,73	B	Baik
2	2013	76,54	B	Baik
3	2014	71,83	B	Baik
4	2015	71,43	B	Baik

Sumber : Bagian Organisasi dan PAN 2015

Perbandingan nilai IKM pada tahun 2012 hingga 2015 tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Nilai tertinggi terjadi pada tahun 2013 sedangkan terendah pada tahun 2015. Namun secara umum, nilai-nilai tersebut masih berada dalam satu interval, yaitu interval 62,51-81,25 dengan nilai mutu B. Pada tahun 2011 kegiatan





ini belum terlaksana sehingga tidak ada nilai capaiannya

- ❖ Program yang mendukung capaian sasaran strategis 2 adalah sebagai berikut :
  - a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan dan Kebijakan KDH
  - b. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Sistem dan Prosedur Pengawasan
  - c. Program Penataan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
  - d. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
  - e. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
  - f. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
  
- ❖ Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran 2 adalah:
  - a. Pemanfaatan teknologi SIMDA dalam pengelolaan Keuangan Daerah
  - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ASN dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan laporan keuangan
  - c. Keberhasilan Padang Pariaman dalam melakukan pengelolaan aset.
  - d. Adanya tim review dari inspektorat yang intensif mereview laporan keuangan SKPD mulai dari pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD sampai final laporan keuangan SKPD (LKPD).
  - e. Peningkatan kualitas pelayanan publik pada SKPD.
  - f. Manajemen pelayanan yang tertata rapi.
  - g. Kualitas sumber daya manusia yang berkompeten dalam melakukan pelayanan publik
  
- ❖ Hambatan dan Masalah
  - a. Masih ada ASN yang tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
  - b. Masih ada Kelemahan dalam penyediaan nilai persediaan dan nilai aset tetap diantaranya nilai tanah.
  - c. Sarana dan prasarana yang kurang lengkap.
  - d. Karena keterbatasan jumlah sampel dalam melakukan Survey Indeks



Kepuasan Masyarakat, besar kemungkinan ada bias dari hasil survey tersebut.

❖ Strategi pemecahan masalah:

- a. Pembentukan Tim Review dari inspektorat untuk mendampingi SKPD dalam penyusunan laporan keuangan sehingga dapat menghindari adanya kemungkinan kesalahan dan penyelewengan atas tujuan yang akan dicapai serta dapat membantu melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.
- b. Lebih memperbanyak sampel dalam Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) sehingga nilai IKM lebih dapat mengurangi bias dari hasil survey tersebut, sehingga hasil survey tersebut bisa dijadikan masukan untuk perbaikan pelayan publik di Kabupaten Padang Pariaman pada masa mendatang.

### Sasaran Strategis 3

#### Meningkatnya Pemerataan dan Jangkauan Akses Pelayanan Pendidikan

Sasaran Strategis 3 merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi III yaitu **“Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkeperibadian wirausaha”**. Untuk mengukur capaian Sasaran strategis ini digunakan 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu angka rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Untuk capaian ke dua indikator tersebut didukung langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman. Hasil capaian indikator kinerja utama pada Sasaran Strategis 3 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 3**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2014	Tahun 2015			
				Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,86	8,4	6,88	81,90	Berhasil
2	Angka Melek Huruf	Persen	98.5	99	90,39	91,30	Sangat berhasil



## 1. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Pada tahun 2015 realisasi angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Padang Pariaman



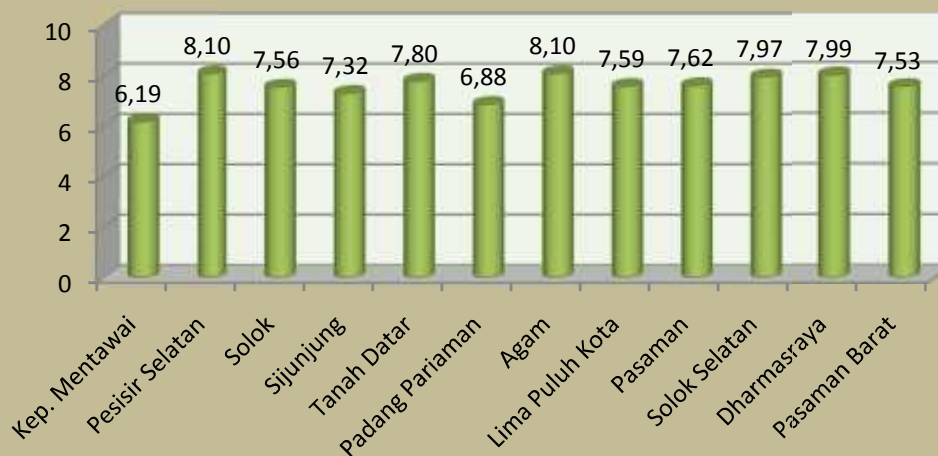
Gambar 3.4 Jenjang pendidikan sebagai syarat wajib belajar 12 tahun

adalah sebesar 6,88 tahun, hal ini tidak mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 8,4 tahun. Meskipun demikian pengukuran terhadap capaian kinerja untuk

indikator ini menunjukkan bahwa capaian kinerjanya **Berhasil**, karena mencapai 81,90 % dari target yang telah dirumuskan.

Sedangkan angka melek huruf berdasarkan data dari BPS menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2014 disajikan sebagai berikut:

**Grafik 3. 1 Angka rata-rata lama sekolah menurut Kab/Kota di Sumatera Barat Tahun 2014**



Sumber: Padang Pariaman Dalam Angka 2015

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk



menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator Rata-rata lama sekolah ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar UNDP (Badan Program Pembangunan PBB) adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditentukan.

Angka Rata-rata Lama Sekolah akan menjadi salah satu komponen pembentuk indikator Indeks Pembangunan Manusia yaitu pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia

## 2. Angka Melek Huruf

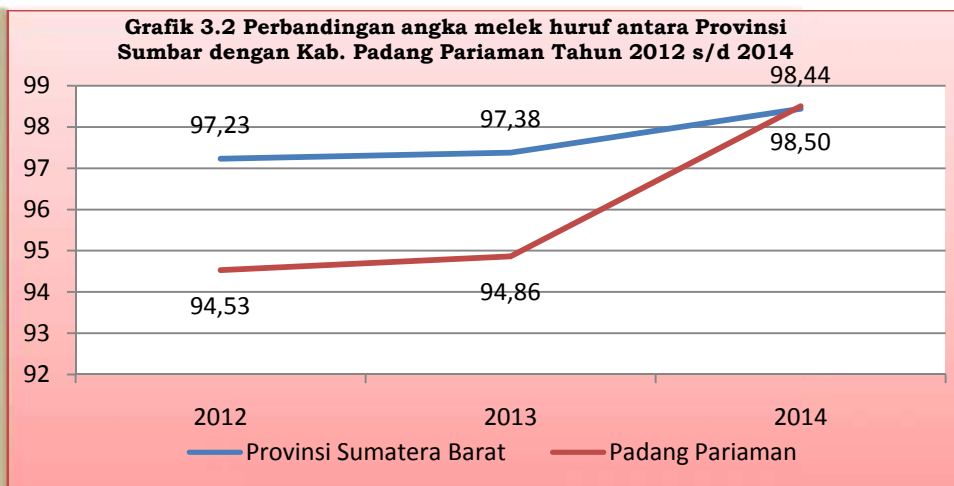
Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.



Gambar 3.5 Upaya pemerintah dalam meningkatkan angka melek huruf

Target penuntasan buta aksara merupakan bagian dari fokus pembangunan untuk peningkatan *human capital*, mengingat peran sentral pendidikan baik sebagai bagian dari pemenuhan hak warga negara, maupun karena daya ungkit pendidikan terhadap tujuan pembangunan yang lain seperti pembangunan dan pemerataan ekonomi dan sosial.

Realisasi kinerja tahun 2015 menunjukkan bahwa angka melek huruf tidak mencapai target yang ditetapkan, dengan pencapaian 90.39% dari target 99%. Meskipun pada tahun 2015 ini realisasinya tidak mencapai target akan tetapi capaiannya menunjukkan hasil yang sangat berhasil yaitu sebesar 91.30%.



Meskipun pada tahun 2015 indikator angka melek huruf di Padang Pariaman mengalami penurunan, akan tetapi menurut data grafik diatas angka melek huruf Kabupaten Padang Pariaman bila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat hingga tahun 2014 trend setiap tahunnya mengalami peningkatan

**Tabel 3.11 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 3**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	tahun	6,68	6,77	6,86	6,88	6,88*
2	Angka Melek Huruf	%	94,07	98,5	98,5	90,39	90,39*

\*angka sementara, Sumber Padang Pariaman dalam angka 2015, Untuk realisasi 2011 s/d 2013 Sumber BAPEDA Kab. Padang Pariaman

Dalam rangka untuk meningkatkan sasaran diatas, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Pendidikan telah melakukan berbagai upaya selama rentang waktu 2011 s/d 2015. Upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan. Adapun program yang dilaksanakan adalah:

- Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun
- Program Pendidikan Menengah
- Program Pendidikan Non Formal
- Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidik
- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan



### Hambatan dan Masalah

- ❖ Infrastruktur seperti jalan menuju lokasi sekolah sebagian ada yang rusak dan digenangi air ketika turun hujan.
- ❖ Budaya, sebagian masyarakat Kabupaten Padang Pariaman masih melestarikan budaya “marantau”, ikut saudara berdagang ke daerah lain.
- ❖ Topografi, daerah yang sebagian berbukit dan terjal sehingga rawan untuk dilewati.
- ❖ Masalah pendataan, karena data terus bergerak dan kurang up to date.
- ❖ Terkait dana untuk meminimalisir angka melek huruf yang masih kurang.

### Strategi pemecahan masalah:

- ❖ Perbaiki infrastruktur untuk peningkatan akses ke sekolah
- ❖ Menambah anggaran operasional sekolah.
- ❖ Meningkatkan prasarana, seperti: bus sekolah
- ❖ Mendistribusikan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dengan tepat sasaran.
- ❖ Perlu dilakukan pendataan secara kooperatif dengan pihak terkait seperti wali nagari (kepala desa)
- ❖ Perlu penganggaran yang lebih tepat dan memadai.

### Sasaran Strategis 4

#### Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

Sasaran Strategis 4 juga merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi III yaitu **“Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkeperibadian wirausaha”**. Untuk mengukur capaian Sasaran strategis ini digunakan 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu Angka Harapan Hidup. Untuk capaian ke dua indikator tersebut didukung langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman. Hasil capaian indikator kinerja utama pada Sasaran Strategis 4 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 4**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Relisasi Tahun 2014	Tahun 2015			Kategori
				Target	Realisasi	Capaian (%)	





1	Angka Harapan Hidup	Usia	Persen	67.18	72.56	67.24	92.66	Sangat Berhasil
---	---------------------	------	--------	-------	-------	-------	-------	-----------------

Realisasi kinerja pada tahun 2015 untuk Angka Harapan Hidup ini sebesar

67.24 % atau meningkat dibandingkan tahun 2014

yaitu sebesar 67.18 5,

walaupun demikian

peningkatan ini tidak

mencapai target yang

sudah ditetapkan pada

tahun 2015 yaitu sebesar 72.56 %. Meskipun tidak mencapai target untuk pencapaiannya dikategorikan **sangat berhasil** mencapai sebesar 92.66 %.



Gambar 3.7 Salah satu perhatian pemerintah terhadap lansia dalam meningkatkan angka usia harapan hidup

Angka Harapan Hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk. Angka harapan hidup adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

Angka Harapan Hidup di suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya tergantung dari kualitas hidup yang mampu dicapai oleh penduduk. Angka Harapan Hidup sangat dipengaruhi beberapa faktor seperti Lingkungan, Pelayanan Kesehatan, Keturunan dan Perilaku Masyarakat. Selain faktor-faktor yang dapat meningkatkan angka harapan hidup, ada juga faktor yang dapat menghambat laju angka harapan seperti kematian bayi, wabah penyakit, bencana alam dan lainnya.

Demi meningkatkan angka harapan hidup maka upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan derajat kesehatan melalui kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat, oleh karena itu Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Kesehatan telah melakukan berbagai macam program dan kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat, diantaranya adalah:

a. Meningkatkan Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat



seperti menggalakan UKM/UKGM, Posyandu dan Posyandu Lansia.

- b. Perbaikan Gizi masyarakat dengan pemberian PMT pada balita dan bumil.
- c. Pengembangan lingkungan sehat dengan pembuatan jamban sehat dan MCK pada masyarakat miskin diwilayah kerja Puskesmas.
- d. Peningkatan keselamatan ibu dan melahirkan anak dengan jalan pemantauan terhadap ibu hamil diwilayah kerja puskesmas terutama ibu hamil resti (resiko tinggi).
- e. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular sudah dilakukan berbagai aksi seperti untuk bayi dan balita dilakukan Imunisasi baik itu imunisi Polio, Campak, TT dan BCG.
- f. Fogging penyemprotan terhadap sarang nyamuk dan serangga yang menjadi vektor penyakit

### **Hambatan dan Masalah**

#### ❖ Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

Perawatan kasus gizi buruk di Puskesmas tidak bisa dilaksanakan, karena orang tua balita tidak merawat anaknya di puskesmas, sehingga belum semua balita gizi kurang dan ibu hamil Kekurangan Energi Kalori (KEK) mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan.

#### ❖ Survey pemantauan status gizi

Tenaga pengelola gizi di puskesmas belum sesuai dengan latar belakang pendidikannya, hal ini dibuktikan dengan masih adanya pengelola gizi yang bukan berlatar belakang pendidikan gizi dan jumlah alat antropometri yang belum memadai sehingga kegiatan survey pemantauan status gizi belum maksimal dilaksanakan.

#### ❖ Pelayanan Kesehatan Lansia

Perhatian dan kepedulian terhadap lansia masih minim, mengakibatkan tidak adanya peningkatan kesehatan dan kemandirian terhadap Lansia, sehingga pelayanan kesehatan lansia dalam bentuk kegiatan peningkatan kesehatan dan kemandirian lansia belum terlaksana dengan maksimal.

#### ❖ Rakor pelayanan kekerasan terhadap anak dan perempuan

Kekerasan terhadap anak dan perempuan menjadi salah satu kasus yang perlu mendapatkan perhatian semua pihak, dengan adanya rakor





pelayanan kekerasan terhadap anak dan perempuan diharapkan mampu menjadi salah satu bentuk pencegahan kekerasan tersebut. Rakor ini masih sekedar pertemuan untuk meningkatkan kegiatan, perlu lebih banyak sosialisasi tentang KTAP (Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan) baik dari lintas sektor dan masyarakat.

- ❖ Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan tentang Program Kesehatan Peduli Remaja (PKPR).

Pelaksanaan program dengan maksimal harus didukung dengan kapasitas tenaga kesehatan dan pihak yang terkait yang mendukung. Oleh karena itu perlu kegiatan khusus untuk mendukung program tersebut, namun kegiatan yang terlaksana masih sebatas pertemuan, perlu lebih banyak sosialisasi dan perlu dilakukan pendekatan kepada kepala sekolah dan guru untuk ikut melibatkan remaja tepatnya siswa untuk menjadi konselor sebaya, kegiatan ini dapat diterapkan disekolah-sekolah dengan kerjasama dari puskesmas.

- ❖ Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, belum terlaksana dengan maksimal, pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan baru sebatas pertemuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dipuskemas, sedangkan untuk kegiatan lainnya tidak terlaksana karena terkendala dengan SDM pelaksananya.

- ❖ Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana

Pelayanan kesehatan untuk para korban bencana sangat diperlukan mengingat Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu daerah yang rawan bencana. Namun pelayanan tersebut tidak dapat terlaksana dengan maksimal terkait dengan kesiapan. Belum adanya pengadaan barang dan alat yang dapat mendukung sistem informasi bila terjadi bencana.

### **Strategi pemecahan masalah:**

- ❖ Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kesehatan.
- ❖ Meningkatkan perhatian pada lansia.
- ❖ Melakukan sosialisasi pada masyarakat mengenai kesehatan dan



ancaman kesehatan yang akan mengancam.

- ❖ Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti: BPJS.
- ❖ Meningkatkan pelayanan pada korban bencana.

### Sasaran Strategis 5

**Mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas, produktivitas dan berdaya saing tinggi dengan pelatihan keterampilan berorientasi penempatan dan kemandirian tenaga kerja.**

Sasaran Strategis 5 merupakan sasaran strategi terakhir setelah sasaran strategi 3 dan 4 dalam upaya untuk mencapai Misi III yaitu **“Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkeperibadian wirausaha”**. Untuk mengukur capaian Sasaran strategis ini digunakan 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka dan Persentase pencari kerja yang ditempatkan. Untuk capaian ke dua indikator tersebut didukung langsung oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman. Hasil capaian indikator kinerja utama pada Sasaran Strategis 5 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 5**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Relisasi Tahun 2014	Tahun 2015			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Tingkat pengangguran terbuka	persen	7,83	9,38	7,83*	116,53	Sangat Berhasil
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	65,8	3,2	65,8*	2.056,35	Sangat Berhasil

\*angka sementara, sumber Padang Pariaman dalam angka Tahun 2015

#### 1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja.



Gambar 3.8 Pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja

menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan.

Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka termasuk ke dalam kategori sangat berhasil karena hasil capaiannya 116,53%. Pada tahun 2011 sampai tahun 2013 Tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan. Artinya pada rentang tahun tersebut jumlah pengangguran di Padang Pariaman mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sementara pada tahun 2014 dan 2015 tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan sebesar 0,66 % dari tahun 2013. Walaupun mengalami sedikit kenaikan tapi secara target realisasi capaian ini sudah melebihi target.

Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat

## 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja.

TPAK

besarnya angkatan dunia kerja. digunakan indikator kesulitan untuk



Gambar 3.9 Partisipasi angkatan kerja

pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya

mengukur partisipasi kerja dalam TPAK dapat sebagai tingkat angkatan kerja mendapatkan



kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia. Beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya nilai TPAK :

- a) **Usia angkatan kerja**
- b) **Jenis kelamin**
- c) **Pendidikan**

Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami penurunan pada tahun 2012 dan 2013 bila dibandingkan dari tahun 2011. Namun pada tahun 2014 kembali mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel

**Tabel 3.14 Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 5 dari tahun 2011 s/d 2015**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Tingkat pengangguran terbuka	persen	9,55	7,18	7,17	7,83	7,83*
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	64,76	64,15	62,12	65,8	65,8*

**Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:**

- ❖ Adanya Balai Latihan Kerja (BLK) yang memberikan pelatihan kepada masyarakat agar siap diterima di dunia kerja.
- ❖ Adanya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan mengenai rekrutmen calon tenaga kerja yang siap pakai.
- ❖ Adanya program magang di beberapa perusahaan.
- ❖ Menyebarkan informasi terkait dengan lowongan pekerjaan.

**Hambatan dan Masalah:**

- ❖ Pendaftar pencari kerja kurang sehingga sedikit yang mengurus dokumen AK 1 (kartu kuning) ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman.
- ❖ Akibat program moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diterapkan oleh Pemerintah pusat dari tahun 2011 hingga 2015.
- ❖ Banyaknya warga terutama yang berada pada usia pencari kerja yang pindah domisili.



### Strategi pemecahan masalah

- ❖ Menambah jenis-jenis pelatihan.
- ❖ Menambah instruktur.
- ❖ Meningkatkan kualitas instruktur.
- ❖ Menambah kerjasama dengan perusahaan lain.
- ❖ Menggalakkan semangat kewirausahaan pada generasi muda.
- ❖ Menggalakkan produksi dalam negeri dan produksi lokal.
- ❖ Mempermudah dan mempercepat pengurusan dokumen AK 1
- ❖ Melakukan kerjasama dengan pihak asing terkait dengan rekrutmen/penerimaan tenaga kerja.

### Sasaran Strategis 6

#### Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

Sasaran Strategis 6 merupakan sasaran strategi mencapai Misi IV yaitu **“Mewujudkan pembangunan ekonomi yang tangguh dan berdaya saing berbasis sistem agribisnis dan agroindustri”**. Sasaran ini didukung oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan untuk pencaapaian Indikatori Kinerja Utama Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya dan Indikator Kinerja Utama Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB. Sementara itu Indikator Kinerja Utama yang berhubungan dengan perikanan budaya dan perikanan tangkap didukung secara terpadu. Hasil pengukuran semua indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.15 Capaian Indikator Utama untuk Sasaran 6.**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2014	Tahun 2015			
				Target	Realisasi	Capaian	Kategori



1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ha) (Pertanian)	Ton	5.32	5.79	5.35	92.40	Sangat berhasil
2	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%) (Pertanian)	%	21.14	20.46	20.89	102.10	Sangat berhasil
3	Produksi perikanan tangkap (ton)	Ton	36.545,09	24.444,5	22.720,30	93	Sangat berhasil
4	Produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	35.442,01	23.879	49.031,73	206	Sangat berhasil
5	Tingkat Pendapatan pembudidaya/bulan (Rp.)	Rp.	2.196.150	2.415.765	2.159.035	90	Sangat berhasil
6	Tingkat Pendapatan nelayan/bulan (Rp)	Rp.	1.456.604	1.656.604	1.536.665	93	Sangat berhasil
7	Persentase kontribusi usaha perikanan terhadap PDRB	%	4	5	4,7	94	Sangat berhasil



1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ha) (Pertanian).

Lahan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman digunakan untuk berbagai macam hal, yaitu untuk pemukiman, sawah, tegalan, kebun campuran dan perkebunan rakyat serta hutan belukar. Persentase pemanfaatan lahan untuk semua kepentingan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 3.16 Penggunaan Lahan di Kabupaten Padang Pariaman**

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
1.	Pemukiman	7.501	7,54
2.	Sawah	27.089,5	27,23
3.	Tegalan	632,5	0,66
4.	Kebun Campuran	16.582,0	16,67
5	Perkebunan Rakyat	36.444	36,63
6.	Hutan Belukar	11.232	11,29
<b>Jumlah Total</b>		<b>99.481</b>	<b>100</b>

Sumber : Padang Pariaman dalam angka Tahun 2015

Terlihat pada tabel di atas bahwa penggunaan lahan sawah menempati urutan kedua setelah perkebunan rakyat dalam pemanfaatan lahan di Kabupaten Padang Pariaman dengan persentase sebesar 27,23%. Oleh karena itu angka produktivitas yang digunakan adalah angka produktivitas padi sebagai pangan utama di Kabupaten Padang Pariaman.

capaian

Kategori dari



Gambar 3.10 Panen Raya di Padang Pariaman

produktivitas padi **sangat berhasil** dengan nilai capaian 92,40%. Walaupun kategori capaian adalah sangat berhasil namun belum mencapai 100%, hal ini disebabkan karena oleh beberapa faktor,





diantaranya meningkatnya serangan hama tanaman pangan seperti hama tikus, wereng, blas dan bulai. Akibat serangan hama ini, 293,75 Ha tanaman padi gagal panen. Penyebab lain berupa rendahnya Indeks Pertanaman (IP) akibat musim kemarau, sehingga lahan sawah yang mengandalkan irigasi tadah hujan tidak mendapatkan suplai air. Selama 5 tahun RPJMD Kabupaten Padang Pariaman yaitu dalam rentang waktu 2011 s/d 2015, nilai produktivitas tanaman padi senantiasa mengalami naik turun dapat dilihat dari data berikut :

**Tabel 3.17 Realisasi Produktivitas padi dari tahun 2011 s/s 2015**

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Th. 2011	Realisasi Th. 2012	Realisasi Th. 2013	Realisasi Th. 2014	Realisasi Th. 2015
1	Produktivitas padi (Ton/ha)	5,87	5,15	5,20	5,32	5,35

Sumber : Padang Pariaman dalam angka 2015

Apabila di dibandingkan dengan kondisi awal RPJMD yaitu di tahun 2011 dimana nilai produktivitas padi hanya 4,85 ton/ha maka nilai capaian produktivitas mengalami peningkatan yang cukup baik, karena nilai rata-rata produktivitas padi selama 5 tahun RPJMD adalah 5,38.

## 2. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%).

Kabupaten Padang Pariaman tergolong Kabupaten Agraris. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor pertanian yang menempati urutan kedua setelah transportasi dan pergudangan (*Padang Pariaman dalam angka tahun*

capaian

Kontribusi

pertanian

dalam

**berhasil**

nilai 102,10.

dibandingkan



Gambar 3.11 Panen hasil perkebunan

2014 kontribusi sektor pertanian ini mengalami penurunan sebesar 0,25. Selama periode RPJM dari tahun 2011 s/d 2015 Indikator ini juga mengalami naik turun, dapat dilihat dari tabel berikut :

2015). Nilai indikator sektor termasuk ke kategori **sangat** dengan jumlah Namun apabila dengan tahun





Tabel Realisasi Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB dari tahun 2011 s/d 2015

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Th. 2011	Realisasi Th. 2012	Realisasi Th. 2013	Realisasi Th. 2014	Realisasi Th. 2015
1	Kontribusi sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	23,89	23,09	22,10	21,14	20,89

Sumber : Padang Pariaman dalam angka tahun 2015

Meskipun terlihat naik turun dari tahun ke tahun namun apabila dibandingkan dari target akhir RPJMD yaitu 20,46 capaian indikator sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB sudah melewati target, karena nilai kontribusinya adalah 21,14. Keberhasilan Kabupaten Padang Pariaman dalam melakukan pembangunan di bidang pertanian dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perternakan dan Kehutanan (Distannakhut) diantaranya adalah:

- a. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian seperti pembangunan dan rehabilitasi JITUT (Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani) dan JIDES (Jaringan Irigasi Desa)
- b. Pengadaan Alsintan (alat dan mesin pertanian) bagi beberapa kelompok tani dan pengawasan pupuk bersubsidi. Kegiatan lainnya yang tak kalah penting dalam rangka untuk meningkatkan produksi padi adalah kegiatan perlindungan dan pengendalain HPT (Hama Pengganggu Tanaman).
- c. Disamping berbentuk fisik, Distannakhut bersinergi dengan Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP3KKP) dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya petani di Kabupaten Padang Pariaman melalui program-program penyuluhan yang dilaksanakan oleh penyuluh pertanian Kabupaten Padang Pariaman.



### 3. Perikanan Tangkap

Kategori Indikator Produksi Perikanan Tangkap adalah Sangat berhasil dengan nilai 93% hal yang sama juga terlihat pada indikator Tingkat Pendapatan nelayan/bulan yaitu sangat berhasil dengan nilai capaian 93%. Apabila kita bandingkan dengan hasil capaian selama pelaksanaan RPJMD dari tahun 2011 s/d 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.18 Realisasi Produksi Perikanan Tangkap dari tahun 2011 s/d 2015**

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Th. 2011	Realisasi Th. 2012	Realisasi Th. 2013	Realisasi Th. 2014	Realisasi Th. 2015
1	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	30.955	32.337,9	34.813,8	36.545,09	22.720,30

Dari tabel terlihat bahwa, tahun 2011 s/d 2014 produksi perikanan



mengalami peningkatan, namun pada tahun 2015 produksi perikanan mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena adanya *over fishing* pada zona I dan II wilayah penangkapan, sehingga

hasil tangkapan nelayan pada zona I dan II tersebut cenderung menurun. Walaupun hasil tangkapan nelayan mengalami penurunan hal ini ternyata tidak menimbulkan penurunan pada tingkat pendapatan nelayan, karena Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman senantiasa menggalakkan slogan Gemar Makan Ikan melalui program *Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)*, sehingga permintaan terhadap komoditi perikanan terus mengalami peningkatan, meskipun produksi perikanan tangkap menuru. Sehingga penurunan produksi perikanan tangkap tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan nelayan. Hal tersebut tergambar pada tabel di bawah ini

**Tabel 3.19 Realisasi Tingkat Pendapatan nelayan/bulan dari tahun 2011 s/d 2015**



No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Th. 2011	Realisasi Th. 2012	Realisasi Th. 2013	Realisasi Th. 2014	Realisasi Th. 2015
1	Tingkat Pendapatan nelayan/bulan (Rp.)	1.094.368	1.203.805	1.324.185	1.456.604	1.536.665

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015

#### 4. Perikanan Budidaya



Gambar 3.13 Ikan Gurami sebagai salah satu ikan yang banyak dibudidayakan di Padang Pariaman

Kategori capaian produksi perikanan budidaya adalah sangat berhasil dengan nilai capaian 206%. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Dijadikannya Kabupaten Padang Pariaman sebagai sentra Budidaya ikan Gurami di Sumatera Barat.
- Fokus pembangunan perikanan di Kabupaten Padang Pariaman berbasis kawasan, seperti kawasan Minapolitan Perikanan budidaya, Kawasan sentra Perbenihan ikan gurami dan kawasan Budidaya air payau.
- Kegiatan pemberdayaan perikanan budidaya yang menjadi program KKP RI, dilaksanakan di Padang Pariaman seperti Program Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya dan Program Gerakan Pakan mandiri (Grapari) Perikanan Budidaya telah dilaksanakan dengan baik.

Hal yang serupa juga terlihat pada kategori capaian tingkat pendapatan pembudidaya/bulan yaitu sangat berhasil juga. Selama pelaksanaan RPJMD dari tahun 2011 s/d 2015 produksi perikanan budidaya terus mengalami peningkatan, hal ini terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.20 Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Padang Pariaman dari Tahun 2011 s/d 2015**

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Th. 2011	Realisasi Th. 2012	Realisasi Th. 2013	Realisasi Th. 2014	Realisasi Th. 2015
1	Produksi Perikanan budidaya (Ton)	19.485	26.040	35.572,25	35.442,012	49.031,73

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015



Peningkatan produksi perikanan budidaya ternyata diiringi dengan peningkatan pendapatan setiap tahunnya. Hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.21 Tingkat Pendapatan pembudidaya/bulan di Kabupaten Padang Pariaman dari Tahun 2011 s/d 2015**

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Th. 2011	Realisasi Th. 2012	Realisasi Th. 2013	Realisasi Th. 2014	Realisasi Th. 2015
1	Tingkat Pendapatan pembudidaya/bulan (Rp.)	1.650.000	1.996.500	2.196.150	2.196.150	2.159.035

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman TA. 2015

Dalam memfasilitasi perkembangan perikanan budidaya DKP Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan program dan kegiatan diantaranya adalah :

- a. Pembinaan dan pendampingan kelompok pembudidayaan ikan (pokdakan), Pengembangan Budidaya Mina Padi,
- b. Pengembangan Minapolitan dan Pengembangan wirausaha perikanan.
- c. Dalam rangka memfasilitasi kekurangan benih bagi petani ikan di Kabupaten Padang Pariaman, DKP telah meningkatkan aktifitas dan manfaat dari keberadaan Balai Benih Ikan yang ada di dua lokasi yaitu di Kecamatan Lubuk Alung dan Aur Malintang

## 5. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB

Kategori nilai capaian persentase kontribusi usaha perikanan terhadap PDRB adalah sangat berhasil, dengan nilai capaian 94%. Selama pelaksanaan RPJMD dari tahun 2011 s/d capaian dari indikator ini mengalami peningkatan, hal ini terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.22 Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB di Kabupaten Padang Pariaman dari Tahun 2011 s/d 2015**

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Th. 2011	Realisasi Th. 2012	Realisasi Th. 2013	Realisasi Th. 2014	Realisasi Th. 2015
1	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (%)	2,9	3,2	3,4	4	4,7

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015

**Hambatan dan Masalah:**

- a. Alih fungsi lahan dari persawahan menjadi pabrik, sehingga terjadi pergeseran arah pembangunan ke sektor jasa dan industri
- b. Serangan hama yang beresiko terhadap tingkat produksi hasil pertanian.
- c. Faktor cuaca el nino yang terjadi pada tahun 2015.
- d. Bencana asap yang terjadi akibat kebakaran hutan di kawasan Pulau Sumatera pada tahun 2015.
- e. Prasarana dan Sarana Pendukung budidaya masih kurang memadai seperti jalan, jembatan dan saluran.
- f. Masih rendahnya laju pertumbuhan ikan sehingga produksi budidaya perikanan belum optimal.
- g. Belum optimalnya pemanfaatan potensi lahan budidaya perikanan, baik air tawar, laut dan payau.
- h. Mahalnya harga pakan ikan yang diproduksi oleh pabrik.
- i. Keterbatasan sarana dan prasarana tangkap, sehingga banyak nelayan hanya melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara tradisional.
- j. Maraknya penangkapan ikan melalui penggunaan bahan dan alat penangkapan terlarang, pencemaran perairan dan adanya degradasi fisik wilayah pesisir, sehingga menyebabkan kerusakan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan seperti mangrove dan terumbu karang.
- k. Jaringan pemasaran dan informasi pasar yang masih terbatas.
- l. Pelaku usaha perikanan masih banyak yang belum memiliki SIP, PIRT dan Sertifikatikasi Halal.

**Strategi Pemecahan Masalah:**

- a. Menambah jumlah irigasi
- b. Memberikan peringatan/himbauan kepada petani mengenai kondisi cuaca yang akan terjadi sehingga dapat meminimalisir dampak buruk yang akan terjadi.
- c. Melakukan sosialisasi mengenai cara mengatasi serangan hama.
- d. Penguatan lembaga koperasi pertanian.
- e. Penguatan permodalan bagi kelompok tani.
- f. Peningkatan SDM Pembudidaya melalui penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala.
- g. Penggunaan benih ikan yang telah melalui uji penyakit secara berkala



- dari balai benih atau UPR bersertifikat
- h. Penerapan teknologi budidaya sesuai standar CBIB/CPIB, penggunaan probiotik dan bantuan sarana dan prasarana budidaya perikanan.
  - i. Menyelenggarakan pelatihan dalam pengolahan pakan ikan berkualitas berbasis bahan baku lokal.
  - j. Memberikan bantuan berupa benih dan pakan ikan kepada pembudidaya perikanan, dan memberikan bantuan peralatan berupa mesin tempel, alat tangkap jaring, alat tangkap rajungan (bubu) kepada nelayan, serta pengadaan rumpon laut dangkal.
  - k. Memberikan sosialisasi, pembinaan, penyuluhan hukum, operasi penertiban dan memberikan izin usaha penangkapan ikan serta usaha perikanan.
  - l. Menggalakkan program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN).
  - m. Memberikan program paket sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran serta pelatihan manajemen pemasaran kepada pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan.
  - n. Memfasilitasi pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan dalam pengurusan perizinan berupa SIUP, PIRT, dan Sertifikat Halal dari MUI.

## Sasaran Strategis 7

### Berkembangnya Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi

Sasaran Strategis 7 merupakan sasaran strategi yang juga untuk mencapai Misi IV yaitu **“Mewujudkan pembangunan ekonomi yang tangguh dan berdaya saing berbasis sistem agribisnis dan agroindustri”**. Sasaran ini didukung oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Diskoperindag ESDM). Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan 2 indikator kinerja utama. Hasil pengukuran indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.23 Capaian Indikator Utama untuk Sasaran 7**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Relisasi Tahun 2014	Tahun 2015			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Jumlah koperasi sehat	Koperasi	7	10	8	80	Sangat





2	Jumlah UMKM yang aktif	UMKM	11.021	11.250	11.021	98	Sangat Berhasil
<b>Rata-rata</b>						89	

Sumber : Diskoperindag dan ESDM Kab. Padang Pariaman TA. 2015

## 1. Jumlah Koperasi Sehat

Menurut UU No. 25 tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip



Gambar 3.14 Apresiasi koperasi untuk berbagi

Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dengan demikian Koperasi berfungsi sebagai salah satu faktor penggerak ekonomi kerakyatan. Koperasi dapat merangkul berbagai usaha mikro dan kecil untuk secara bersama-sama tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang maju dan mandiri.

Koperasi lahir dari masyarakat. Keberadaan Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggota. Keanggotaan Koperasi bersifat terbuka dimana pengelolaannya menggunakan prinsip-prinsip demokrasi. Anggota Koperasi menerima hak atas pembagian keuntungan yang diperoleh, dan berprinsip kemandirian.

Koperasi telah dirasakan peran dan manfaatnya oleh masyarakat, walaupun derajat dan intensitasnya berbeda. Terdapat 3 (tiga) tingkat menjadi alternatif bagi lembaga usaha lain. *Ketiga*, koperasi menjadi organisasi yang dimiliki anggotanya, dimana faktor utama yang menyebabkan koperasi mampu bertahan terhadap berbagai kondisi yang sulit karena mengandalkan loyalitas anggota dan kesediaan anggota untuk bersama-sama koperasi menghadapi kesulitan tersebut.

## 2. UMKM yang aktif

Usaha Mikro Kecil memiliki peran yang besar dalam perekonomian



nasional. UMKM terbukti tangguh dan memiliki daya tahan dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi. Menurut UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Perkembangan Jumlah Koperasi Sehat dan UMKM aktif selama tahun 2011 s/d 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.24 Realisasi Jumlah Koperasi Sehat dan UMKM Aktif dari tahun 2011 s/d 2015**

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Th. 2011	Realisasi Th. 2012	Realisasi Th. 2013	Realisasi Th. 2014	Realisasi Th. 2015
1	Jumlah koperasi sehat	Koperasi	1	3	7	7
2	Jumlah UMKM yang aktif	UMKM	10.404	10.814	10.902	11.021

Sumber : Diskoperindag ESDM tahun 2015.

Sebagai salah satu sektor penggerak ekonomi, Koperasi dan UMKM menjadi fokus pembinaan oleh Pemerintah Padang Pariaman. Melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupaya memberdayakan dan memperkuat Koperasi dan UMKM melalui program-program sebagai berikut:

- a. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah.

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah Pelatihan Kewirausahaan bagi Koperasi dan UMKM. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan dan daya saing UMKM. Disamping melatih dari segi kewirausahaan peserta juga dibekali Pelatihan akuntansi perkoperasian bagi pengurus Koperasi dan LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Non Koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembangan Koperasi melalui diklat perkoperasian bagi pengurus Koperasi dan LKM Non Koperasi.

- b. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah

Disamping dilakukannya pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Koperasi dan UMKM yang bertujuan untuk





meningkatkan pengawan terhadap penggunaan dana pemerintah yang terdapat pada Koperasi dan UMKM, program ini juga bertujuan untuk melakukan pembinaan dan penilaian kesehatan simpan pinjam agar terjadinya peningkatan kualitas kelembagan koperasi melalui penilaian kesehatan simpan pinjam dan unit simpan pinjam.

- c. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan koperasi. Program ini juga bertujuan untuk mengaktifkan kembali koperasi yang sudah mati suri.

❖ **Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran 7 adalah selain program-program di atas adalah:**

- a) Memberikan fasilitasi pelayanan pengurusan izin UMKM
- b) Membantu permodalan
- c) Membantu mempromosikan produk

❖ **Hambatan dan Masalah**

- a. Adanya beberapa koperasi yang tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dalam kurun waktu 2-3 tahun.
- b. Masih ada sebagian koperasi yang tidak memberikan laporan keuangan.
- c. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki koperasi masih kurang dari segi kualitas
- d. Manajemen koperasi yang belum baik.
- e. Turun naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sehingga berdampak pada produktivitas UMKM.
- f. Tingginya harga bahan mentah.
- g. Persaingan produk.
- h. Data jumlah UMKM yang kurang *up to date*.

❖ **Strategi Pemecahan Masalah**

- a. Memberikan sanksi bagi koperasi yang tidak memberikan laporan keuangan.



- b. Meningkatkan SDM koperasi.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi.
- d. Membantu UMKM dalam pengurusan perizinan usaha.
- e. Membantu UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal.
- f. Lebih giat lagi melakukan promosi produk hasil olahan.
- g. Menggalakkan olahan produk lokal.
- h. Menumbuhkan semangat kewirausahaan pada masyarakat terutama pada generasi muda.

### Sasaran Strategis 8

#### Meningkatnya Investasi Berbasis Ekonomi Kerakyatan

Sasaran Strategis 8 merupakan sasaran strategi yang juga untuk mencapai Misi IV yaitu **“Mewujudkan pembangunan ekonomi yang tangguh dan berdaya saing berbasis sistem agribisnis dan agroindustri”**. Sasaran ini didukung oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T). Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja utama. Hasil pengukuran indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.25 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 8**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Relisasi Tahun 2014	Tahun 2015			Kategori
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Jumlah nilai investasi berskala Nasional (PMA/PMDN)	Milyar	61	333	134,67	42	Cukup Berhasil



Capaian indikator jumlah investasi berskala nasional adalah 42% termasuk kedalam kategori cukup berhasil, atau belum bisa mencapai target yang ditetapkan. Kegagalan pencapaian target ini disebabkan karena hanya beberapa perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPN) sehingga tidak dapat dilihat sejauh mana perkembangan PMA & PMDN dan hanya beberapa PMA & PMDN yang merealisasikan investasinya. Selama rentang waktu pelaksanaan RPJMD yaitu dari tahun 2011 s/d 2015 jumlah Investasi berskala Nasional mengalami pasang surut. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.26 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) dari tahun 2011-2015**

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Th. 2011	Realisasi Th. 2012	Realisasi Th. 2013	Realisasi Th. 2014	Realisasi Th. 2015
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (dalam Milyar rupiah)	250	160	193	61	134,67

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Padang Pariaman Tahun 2015  
Program-program yang telah dilaksanakan dalam rangka untuk peningkatan jumlah investasi berskala nasional ini. Diantaranya adalah :

a. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

Kabupaten Padang Pariaman mengikuti kegiatan promosi yang bertujuan untuk menggaet investor untuk berinvestasi di Kabupaten Padang Pariaman. Bagi investor yang telah berinvestasi di Kabupaten Padang Pariaman, BPMP2T juga melakukan upaya pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan (PMA/PMDN) yang ada di Kab. Padang Pariaman.

b. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.

Melalui program ini telah dilakukan upaya Penyederhanaan Proses Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal untuk mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif di Padang Pariaman, sehingga proses perizinan lebih akurat, efektif dan efisien. Upaya tersebut dilakukan dalam bentuk penyusunan draft Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) yakni draft ranperda IMB,



Izin Lokasi, IUJK dan Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian di Kab. Padang Pariaman.

c. Program pengembangan pelayanan perizinan

Operasional Pelayanan Perizinan Secara Elektronik yang diwujudkan penggunaan aplikasi untuk memberikan pelayanan perizinan. Aplikasi yang digunakan adalah :

- SiCantik, yang dapat digunakan untuk Layanan Terpadu untuk Publik
- Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
- Sistem Informasi Perusahaan Online (SIPO)

❖ **Hambatan dan Masalah yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis 8 adalah:**

- a. Hanya beberapa perusahaan yang melakukan realisasi investasi
- b. Hanya beberapa perusahaan yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) sehingga tidak bisa menghitung perkembangan perusahaan.

❖ **Strategi pemecahan masalah:**

- a. Mengadakan fasilitasi perusahaan mengenai cara pengisian LKPM.
- b. Memberikan sanksi sesuai peraturan kepala BKPM No 14 tahun 2015 tentang pedoman dan tata cara penanaman modal, Perka BPKM No 15 tahun 2015 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan penanaman modal serta Perka BKPM No 17 tahun 2015 tentang pedoman dan tata cara pengendalian, pelaksanaan penanaman modal. Adapun sanksi yang diberikan berupa:
  - Surat peringatan (SP) 1, 2 dan 3
  - Mencabut izin usaha

**Sasaran Strategis 9**

**Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata**

Sasaran Strategis 9 merupakan sasaran strategi yang juga untuk mencapai Misi IV yaitu **“Mewujudkan pembangunan ekonomi yang tangguh dan**



**berdaya saing berbasis sistem agribisnis dan agroindustri**". Sasaran ini didukung oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar). Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja utama. Hasil pengukuran indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.27 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis 9**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Relisasi Tahun 2014	Tahun 2015			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Kunjungan Wisata	Orang	4.293	3.600	33.000	916,67	Sangat Berhasil



Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Padang pada tahun 2015 yang merupakan kondisi akhir RPJMD terealisasi sebesar 33.000 orang hal ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 4.293 orang. Pada tahun 2015 ini walaupun tidak bisa mencapai target RPJMD yang telah ditetapkan sebesar 36.000 orang, akan tetapi capaiannya kategorikan **Sangat Berhasil** karena mencapai 91.66%. Perkembangan jumlah wisatawan dari tahun 2011 s/d 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.28 Realisasi Kunjungan Wisata dari tahun 2011 s/d 2015**

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Th. 2011	Realisasi Th. 2012	Realisasi Th. 2013	Realisasi Th. 2014	Realisasi Th. 2015
1	Kunjungan Wisata	3.249	3.300	3.500	4.293	33.000

Sumber. Disporabudpar tahun 2015

Peningkatan jumlah kunjungan wisata yang cukup signifikan setiap tahunnya, merupakan hasil dari upaya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mengembangkan objek wisata, antara lain :

1. Air Terjun Nyarai yang berlokasi di Kecamatan Lubuk Alung, merupakan objek wisata alam
2. Pantai Tiram di Kecamatan Ulakan Tapakis
3. Pantai Gosong,
4. Pantai Arta di Kecamatan Sungai Limau
5. Makam Syech Burhanuddin di Kecamatan Ulakan Tapakis



Gambar 3.15 Pantai Tiram



Gambar 3.16 Nyarai



Gambar 3.17 Makam Syech Burhanuddin

Disamping pengembangan objek wisata Kabupaten Padang Pariaman juga melakukan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, melalui :

1. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara  
Kegiatan ini merupakan Promosi pariwisata daerah Kabupaten Padang Pariaman yang diikuti melalui event-event pameran tingkat nasional dan



internasional. Adapun event – event yang di ikuti :

- Pariaman Exspo yang dilaksanakan pada tanggal 02 s/d 04 April 2015 bertempat di Pariaman yang bertujuan untuk mempromosikan objek Pariwisata unggulan dan Budaya.
- Deep Extreme yang di laksanakan pada tanggal 29 April s/d 03 Mei 2015 bertempat di Jakarta Convention Centre (JCC) yang bertujuan untk mempromosikan objek wisata minat khusus (Nyarai).
- Pariwisata Pesona Ranah Minang yang dilaksanakan pada tanggal 24 s/d 27 November 2015 bertempat di Jogjakarta bertujuan untuk mempromosikan objek wisata unggulan dan Budaya.

## 2. Pengadaan Sarana dan Bahan Promosi Pariwisata

Kegiatan ini merupakan penyediaan saran dan prasarana dan bahan Promosi untuk menunjang kegiatan promosi pariwisata tersebut. Adapun sarana dan bahan promosi pariwisata yang dilaksanakan yakni pembuatan Brosur dan Leaflet objek wisata, plang objek wisata.

## 3. Partisipasi pada Event Tour De Singkarak

Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan tahunan dalam bentuk lomba balap sepeda tingkat internasional yang diadakan di wilayah Sumatera Barat termasuk Kabupaten Padang Pariaman yang dilaksanakan pada tanggal 03



Gambar 3.18 Pelepasan peserta Tour The Singkarak

s/d 11 Oktober 2015 yang di ikuti oleh beberapa negara yang mempunyai peran cukup besar dalam mengenalkan daerahnya. Sehingga jumlah kabupaten dan kota yang menjadi jalur lintasan Tour de Singkarak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Diselenggarakannya Tour de Singkarak dinilai telah dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Padang Pariaman.





#### 4. Pemilihan Cik Uniang dan Cik Ajo



Gambar 3.19 Uniang Ajo

Kegiatan ini merupakan seleksi pemuda pemudi Kabupaten Padang Pariaman yang berprestas dibidang Akademis, Kebudayaan serta Seni dan rasa Nasionalisme yang akan di jadikan Duta Pariwisata Kabupaten Padang Pariaman

Kedepan pengembangan objek wisata di Kabupaten Padang Pariaman dilakukan dengan

1. Pengelolaan dan pengembangan objek wisata wisata di Kabupaten Padang Pariaman akan dikerjakan secara serius dengan cara meningkatkan promosi, melengkapi segala fasilitas yang terdapat di objek wisata serta dengan meningkatkan SDM yang profesional untuk mendukung kegiatan tersebut. Salah satu cara untuk meningkat kualitas SDM tersebut yaitu dengan cara melatih warga setempat sebagai pemandu dimana lokasi objek wisata tersebut berada. Khusus untuk air terjun nyarai ini Bupati Padang Pariaman sudah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Gubernur Sumatera Barat.
2. Pengembangan wisata religius makam Syekh Burhanuddin pendanaannya sudah dianggarkan dalam APBD Sumbar,
3. Objek wisata Pantai Gosong, Pantai Arta, Pantai Tiram oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang Pariaman dengan peningkatan fasilitas pendukung untuk meningkat kualitas serta akan dibuat berbagai even atau kegiatan sebagai sarana bagi daya tarik wisata objek wisata tersebut.





## Sasaran Strategis 10

### Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan

Sasaran Strategis 10 merupakan sasaran strategi yang juga untuk mencapai Misi V yaitu **“Terwujudnya Pembangunan yang ramah lingkungan melalui penanggulangan resiko bencana dan pengelolaan lingkungan hidup”**. Sasaran ini didukung Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan (Distannakhut) Kabupaten Padang Pariaman. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja utama. Hasil pengukuran indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.29 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 10**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Relisasi Tahun 2014	Tahun 2015			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Luas hutan rakyat	Ha	1.428	112	385	343,75	Sangat berhasil

Kategori capaian indikator adalah sangat berhasil dengan nilai capaian 343,75%. Realisasi peningkatan hutan rakyat tahun 2015 memenuhi target yang telah ditetapkan, dimana target 2015 sebesar 112 Ha sedangkan realisasi sebesar 385 Ha yaitu dengan capaian sebesar 343,75%. Pencapaian ini didukung dengan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) Kehutanan dan Dana APBN (BP DAS).

Dibandingkan tahun sebelumnya realisasi luas hutan rakyat dimana pada tahun 2014 sebesar 1.428 Ha turun menjadi 385 Ha. Luasan hutan rakyat dari tahun 2011 s/d 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

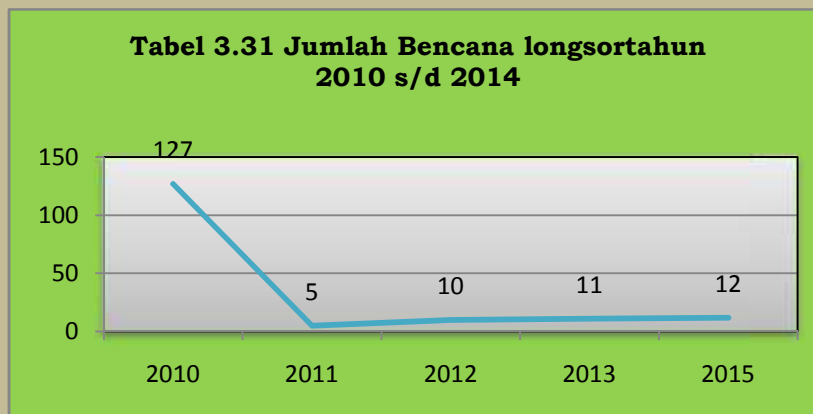
**Tabel 3.30 Perkembangan Penambahan Luas Hutan Rakyat dari tahun 2011 s/d 2015**

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Th. 2011	Realisasi Th. 2012	Realisasi Th. 2013	Realisasi Th. 2014	Realisasi Th. 2015
1	Luas Hutan Rakyat	1.327	985	508	1.428	385

Sumber : Distannakhut Tahun 2015



Penambahan luas hutan rakyat juga memberikan pengaruh yang nyata terhadap penurunan bencana longsor. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Sumber : Padang Pariaman dalam Angka Tahun 2015 (hasil olahan)

#### **Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:**

- ❖ Pemberian bantuan bibit tanaman kepada kelompok tani, seperti mahoni dan suryan.
- ❖ Adanya kontrol yang dilakukan oleh aparat.
- ❖ Adanya kesadaran dari masyarakat terhadap dampak positif yang ditimbulkan, seperti peningkatan ekonomi masyarakat dan mengurangi pengangguran.
- ❖ Dapat memperkuat lahan dan menjaga keseimbangan ekosistem.
- ❖ Adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak yang terkait, kelompok tani, walingari (kepala desa) dll.

#### **Hambatan dan Masalah:**

- ❖ Kurangnya sarana dan prasarana.
- ❖ Kurangnya aparat yang bertugas melakukan kontrol terhadap hutan rakyat.

#### **Strategi pemecahan masalah:**

- ❖ Melengkapi aparat dengan sarana dan prasara yang layak
- ❖ Menambah jumlah aparat
- ❖ Menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak yang terkait.



- ❖ Memperbanyak varian bibit yang akan disalurkan.
- ❖ Melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya fungsi hutan rakyat.
- ❖ Melakukan binaan kepada masyarakat tentang pengolahan hasil hutan rakyat, seperti mahoni dan suryan.
- ❖ Menumbuhkan usaha (UMKM) baru terkait dengan pengolahan hasil hutan.

#### **D. REALISASI KEUANGAN**

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 10 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015 maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :



### III. BAB IV

## IV. PENUTUP

### A. KESIMPULAN

**S**ebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015, disimpulkan bahwa secara

**Penutup berisi :**

**A. Kesimpulan**

**B. Rencana Perbaikan  
Kedepan**

umum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan. Hal ini terlihat dari 20 indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa 14 indikator dikategorikan "sangat berhasil", 4 indikator dikategorikan "Berhasil", dan 2 indikator dikategorikan "Cukup Berhasil".

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 – 2015 khususnya untuk Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator



sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, diakui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari

## **B. Rencana Perbaikan Kedepan**

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2015 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2014 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

